

RINGKASAN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL

TAHUN 2026



RINGKASAN

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN NASIONAL**

NATIONAL FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

TAHUN 2026





**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 351 TAHUN 2026
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk:

- a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;

7. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia;
12. Gubernur seluruh Indonesia;
13. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan seluruh Indonesia; dan
15. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan seluruh Indonesia.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 351 TAHUN 2026
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
NASIONAL TAHUN 2026

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2026





BAB I PENDAHULUAN

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDG-1 adalah pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 adalah mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, perbaikan gizi dan sistem pertanian berkelanjutan. Indikator tercapainya tujuan ini adalah apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi, lansia, dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang, dan target menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dapat dicapai atau merupakan hasil dari pembangunan sistem pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pangan dalam konteks mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Energi, utamanya pada Indonesia Emas/IE-16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari RPJPN Tahun 2025-2045 secara khusus menekankan pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi ini merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan merupakan bagian penting dan strategis untuk turut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian target *Sustainable Development Goals* dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut diperlukan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat serta fokus terhadap sasaran. Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini masalah pangan dan potensi kerawanan pangan dan gizi.

Data dan informasi tentang ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif, akurat, dan mutakhir dapat menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung peran tersebut. Badan Pangan Nasional terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi dalam penyediaan data dan informasi, salah satunya melalui penyediaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yaitu peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. Selain menghasilkan peta, analisis juga memberikan informasi Indeks Ketahanan Pangan dan status ketahanan pangan di masing-masing wilayah.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan bertujuan untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tidak saja mengilustrasikan kondisi ketahanan pangan pada berbagai tingkatan wilayah/daerah, melainkan juga tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan. Oleh karena itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan menjadi alat strategis (*strategic tools*) bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pangan serta mendukung penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pangan di wilayah masing-masing. Selain karakteristik wilayah tahan atau rentan pangan, peta ini pun memuat rekomendasi yang bersifat preskriptif untuk mempertahankan dan memperbaiki situasi ketahanan pangan.

Implementasi pemanfaatan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan *stunting*, pembangunan desa dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. Instansi-instansi yang menggunakan informasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; World Food Programme; dan beberapa Perguruan Tinggi. Hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Indeks Ketahanan Pangan juga dijadikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Di tingkat daerah, Indeks Ketahanan Pangan dan persentase daerah rentan rawan pangan sebagai hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan salah satu indikator kinerja Pembangunan Daerah di bidang pangan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam instruksi



tersebut disebutkan bahwa indikator kinerja pembangunan urusan pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan, sedangkan indikator *outcome* urusan pangan yaitu: (1) persentase jumlah cadangan pangan, (2) Skor Pola Pangan Harapan, (3) persentase daerah rentan rawan pangan, dan (4) persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Selain itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dimanfaatkan pula untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan dalam upaya membangun sistem pangan yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan disusun secara berjenjang di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional disusun dengan level analisis tingkat kabupaten/kota, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi disusun dengan level analisis tingkat kecamatan, dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota disusun dengan level analisis tingkat desa/kelurahan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan menyajikan informasi komprehensif lintas sektoral yang disajikan dalam bentuk peta tematik. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dimotori dan dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat kementerian/lembaga yang berpartisipasi aktif adalah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Perum BULOG. Selain itu, penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dari pertama kali dilakukan bekerja sama dengan World Food Programme (WFP), perguruan tinggi, dan pakar. Di tingkat daerah, penyusunannya melibatkan dinas/kantor/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota.





BAB II METODOLOGI PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

2.1. INDIKATOR DAN SUMBER DATA

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional 2026 menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 (empat ratus enam belas) kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) kota dan disusun menggunakan data tahun 2025 untuk mencerminkan status ketahanan pangan di daerah kabupaten/kota. Penyusunan dilakukan menggunakan 12 (dua belas) indikator yang mewakili 3 (tiga) kelompok/aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Tabel 1). Seluruh indikator yang digunakan dalam analisis dibobot berdasarkan *expert judgement* untuk menghasilkan angka komposit.

Tabel 1. Indikator dan Sumber Data

NO.	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
A. KETERSEDIAAN PANGAN			
1.	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang).	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang). Konsumsi normatif komoditas tersebut sebesar 300 gram/kapita/hari.	• Produksi Pangan 2024 dan 2025, Kementerian Pertanian. • Kerangka Sampel Area 2025, Badan Pusat Statistik.
2.	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	Perbandingan antara konsumsi energi dengan standar kebutuhan energi (2.100 kkal/kapita/hari).	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, Badan Pusat Statistik.
3.	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	Perbandingan antara konsumsi protein hewani dengan standar kebutuhan protein hewani (25 gram/kapita/hari).	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, Badan Pusat Statistik.
4.	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	Perbandingan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025.	Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional 2025, Badan Pangan Nasional.

NO.	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
B. KETERJANGKAUAN PANGAN			
5.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk total.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, Badan Pusat Statistik.
6.	Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	Persentase perbandingan standar deviasi dari harga komoditas pangan (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) terhadap rata-rata harga komoditas tersebut.	Panel Harga Pangan 2025, Badan Pangan Nasional.
7.	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	Proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum energi/ <i>Minimum Dietary Energy Requirement</i> (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, Badan Pusat Statistik.
C. PEMANFAATAN PANGAN			
8.	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah sampai pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) oleh perempuan berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, Badan Pusat Statistik.
9.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 (sepuluh) meter.	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, Badan Pusat Statistik.
10.	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	Rata-rata persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan siap saji yang memenuhi standar keamanan pangan terhadap total sampel.	• <i>E-monev</i> Higiene Sanitasi Pangan 2025, Kementerian Kesehatan. • Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 2025, Badan Pangan Nasional.

NO.	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
11.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Indikator kualitas keragaman pangan yang menggambarkan sumbangan energi dalam susunan kelompok aneka pangan utama pada tingkat ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.	Pola Pangan Harapan 2025, Badan Pangan Nasional.
12.	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	Anak di bawah 5 (lima) tahun yang tinggi badannya <-2 (kurang dari negatif dua) Standar Deviasi dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin.	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Kementerian Kesehatan.

2.2. ANALISIS

Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan 11 (sebelas) indikator dilakukan dengan mengikuti sebaran empiris, sedangkan 1 (satu) indikator, yaitu prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) dilakukan dengan mengikuti aturan World Health Organization (WHO) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Cut off Point Indikator Individu

NO.	INDIKATOR	RANGE	NO.	INDIKATOR	RANGE
A. KETERSEDIAAN PANGAN					
1.	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan.	≥1,50	3.	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	<70
		1,25 - <1,50			70 - <80
		1,00 - <1,25			80 - <90
		0,75 - <1,00			90 - <100
2.	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	0,50 - <0,75	4.	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/ Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	100 - <110
		<0,50			≥110
		<70			<5
		70 - <80			5 - <10
		80 - <90			10 - <15
		90 - <100			15 - <20
		100 - <110			20 - <25
		≥110			≥25

NO.	INDIKATOR	RANGE	NO.	INDIKATOR	RANGE
B. KETERJANGKAUAN					
5.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.	≥30	7.	Prevalence of Undernourishment (PoU).	≥25
		25 - <30			20 - <25
		20 - <25			15 - <20
		15 - <20			10 - <15
		10 - <15			5 - <10
		<10			<5
6.	Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	≥10			
		9 - <10			
		8 - <9			
		7 - <8			
		6 - <7			
		<6			
C. PEMANFAATAN PANGAN					
8.	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	<6,0	11.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	<70
		6,0 - <6,5			70 - <75
		6,5 - <7,5			75 - <80
		7,5 - <8,5			80 - <85
		8,5 - <9,0			85 - <90
		≥9,0			≥90
9.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	≥ 70	12.	Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).	≥40
		60 - <70			30 - <40
		50 - <60			20 - <30
		40 - <50			<20
		30 - <40			
		<30			
10.	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	<30			
		30 - <40			
		40 - <50			
		50 - <60			
		60 - <70			
		≥70			

Analisis Komposit

Pendekatan yang diadopsi untuk analisis komposit dilakukan menggunakan metode pembobotan, yaitu dengan menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Pembobotan yang dilakukan mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI). Goodridge (2007) menyatakan bahwa apabila variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuan. Indeks komposit tersebut selanjutnya disebut Indeks Ketahanan Pangan.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. Penyesuaian data dalam rentang minimum dan maksimum yang telah ditentukan;
2. Penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale cut off point* indikator individu;
3. Perhitungan *cut off* komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing *cut off* indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

$$K(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i c_{ij}$$

Keterangan:

$K(j)$: *Cut off* komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

c_{ij} : Nilai hasil normalisasi *cut off* masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

i : Indikator ke 1, 2, ..., 12

j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ..., 514

Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Besaran bobot masing-masing indikator didasarkan pada penilai para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah tersaji dalam Tabel 3;

Tabel 3. Bobot Indikator dalam Setiap Aspek Ketahanan Pangan

NO.	INDIKATOR	BOBOT
A. KETERSEDIAAN PANGAN		33,5
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang).	9,5
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	8,0
B. KETERJANGKAUAN PANGAN		33,0
5	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.	11,8
6	Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	11,3
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	9,9
C. PEMANFAATAN PANGAN		33,5
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	5,0
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	7,5
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	6,0
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	7,8
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	7,2

4. Penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale* data indikator individu;
5. Perhitungan skor komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i x_{ij}$$

Keterangan:

$Y(j)$: Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

x_{ij} : Nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

i : Indikator ke 1, 2, ..., 12

j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ..., 514

Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing berdasarkan pada bobot masing-masing indikator;

6. Perhitungan indeks komposit dengan mengubah skor komposit ke dalam skala 0-100 (nol sampai 100).

Indeks komposit terbagi menjadi 6 (enam) kelompok/prioritas. Kabupaten/kota yang berada dalam prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), dan agak rentan (prioritas 3), sedangkan kabupaten/kota yang berada dalam prioritas 4, prioritas 5, dan prioritas 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5), dan sangat tahan (prioritas 6) sesuai Tabel 4. Tujuan dari penentuan prioritas adalah untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan.

Tabel 4. Cut off Point Skor Komposit

KELOMPOK IKP	KABUPATEN/ KOTA	KATEGORI
1	≤45,59	Prioritas 1 – Sangat Rentan
2	45,60 – 53,42	Prioritas 2 – Rentan
3	53,43 – 61,47	Prioritas 3 – Agak Rentan
4	61,48 – 69,52	Prioritas 4 – Agak Tahan
5	69,53 – 77,35	Prioritas 5 – Tahan
6	>77,35	Prioritas 6 – Sangat Tahan

7. Penghitungan indeks per aspek kabupaten/kota;
 - a. Menghitung skor setiap indikator dengan mengalikan nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j dengan 100 (karena normalisasi membuat data berada dalam rentang [0-1] sementara Indeks Ketahanan Pangan berada dalam rentang [0-100]);
 - b. Menghitung bobot per aspek masing-masing indikator ke-i dengan cara membagi bobot indikator ke-i dengan bobot per aspeknya;

- c. Skor per aspek kabupaten/kota diperoleh dengan cara:

$$A(j) = \sum_{i=1}^n b_i s_{ij}$$

Keterangan:

$A(j)$: Indeks per aspek kabupaten/kota ke- j

b_i : Bobot per aspek masing-masing indikator ke- i

s_{ij} : Nilai skor masing-masing indikator ke- i pada kabupaten/kota ke- j

i : Indikator ke 1, 2, ..., n

j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ..., 514

n : Jumlah indikator per aspek

8. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi;

IKP Provinsi diperoleh dari hasil perhitungan IKP kabupaten/kota terbobot penduduk, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung bobot penduduk dengan cara membagi jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dengan total penduduk provinsi

$$Rpp_j = \frac{p_j}{Pp}$$

Keterangan:

Rpp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

p_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- j

Pp : Jumlah penduduk provinsi

- b. Mengalikan skor indeks komposit kabupaten/kota dengan bobot penduduk untuk mendapatkan indeks komposit kabupaten/kota terbobot penduduk

$$Ip_j = Rpp_j \times Y_j$$

Keterangan:

Ip_j : IKP terbobot kabupaten/kota ke- j

Rpp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke- j

- c. Menjumlahkan Indeks komposit kabupaten/kota terbobot penduduk dari seluruh kabupaten/kota (n kabupaten/kota) untuk menjadi angka indeks komposit provinsi.

$$IKP \text{ Provinsi } (n) = \sum_{i=1}^n Ip_j$$

Keterangan:

Ip_j : IKP terbobot kabupaten/kota ke- j

9. Perhitungan Indeks per Aspek Provinsi

Perhitungan Indeks per aspek (ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan) provinsi diperoleh dengan cara:

- a. Menghitung bobot penduduk dengan cara membagi jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dengan total penduduk provinsi

$$Rpp_j = \frac{p_j}{Pp}$$

Keterangan:

Rpp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

p_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- j

Pp : Jumlah penduduk provinsi

- b. Mengalikan skor indeks per aspek kabupaten/kota dengan bobot penduduk untuk mendapatkan indeks per aspek kabupaten/kota terbobot penduduk:

$$IAp_j = Rpp_j \times A_j$$

Keterangan:

IAp_j : Indeks per aspek terboboti kabupaten/kota ke- j

Rpp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

A_j : Indeks per aspek kabupaten/kota ke- j

- c. Menjumlahkan Indeks per aspek kabupaten/kota terbobot penduduk dari seluruh kabupaten/kota (n kabupaten/kota) untuk menjadi angka indeks per aspek provinsi

$$IA\ Provinsi = \sum_{i=1}^n \times IAp_j$$

Keterangan:

$IA\ Provinsi$: Indeks per aspek provinsi

IAp_j : Indeks per aspek terboboti kabupaten/kota ke- j

10. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Nasional;

Indeks Ketahanan Pangan Nasional diperoleh dari hasil penghitungan Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota terbobot penduduk, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menghitung bobot penduduk dengan cara membagi jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dengan total penduduk nasional dengan rumus

$$Rp_j = \frac{p_j}{P}$$

Keterangan:

Rp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

p_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- j

P : Jumlah penduduk nasional

- b. mengalikan skor indeks komposit kabupaten/kota dengan bobot penduduk untuk mendapatkan indeks komposit kabupaten/kota terbobot penduduk dengan rumus:

$$I_j = Rp_j \times Y_j$$

Keterangan:

I_j : IKP terboboti kabupaten/kota ke- j

Rp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke- j

- c. menjumlahkan Indeks komposit kabupaten/kota terbobot penduduk dari seluruh kabupaten/kota (514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota) untuk menjadi angka indeks komposit nasional dengan rumus berikut:

$$IKP\ Nasional = \sum_{i=1}^{514} I_j$$

Keterangan:

I_j : IKP terboboti kabupaten/kota ke- j

11. Penghitungan Indeks per Aspek Nasional;

Penghitungan indeks per aspek (ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, dan pemanfaatan Pangan) Nasional diperoleh dengan cara:

- menghitung bobot penduduk dengan cara membagi jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dengan total penduduk nasional dengan rumus:

$$Rp_j = \frac{p_j}{P}$$

Keterangan:

Rp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

p_j : Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- j

P : Jumlah penduduk nasional

- mengalikan skor indeks per aspek kabupaten/kota dengan bobot penduduk untuk mendapatkan indeks per aspek kabupaten/kota terbobot penduduk.

$$IA_j = Rp_j \times A_j$$

Keterangan:

IA_j : Indeks per aspek terboboti kabupaten/kota ke- j

Rp_j : bobot penduduk kabupaten/kota ke- j

A_j : Indeks per aspek kabupaten/kota ke- j

- menjumlahkan Indeks per aspek kabupaten/kota terbobot penduduk dari seluruh kabupaten/kota (514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota) untuk menjadi angka indeks per aspek nasional.

$$IA \text{ Nasional} = \sum_{i=1}^{514} IA_j$$

Keterangan:

$IA \text{ Nasional}$: Indeks per aspek nasional

IA_j : Indeks per aspek terboboti kabupaten/kota ke- j

2.3. PEMETAAN

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang membidangi pemetaan (Badan Informasi Geospasial). Peta-Peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat Kerentanan Pangan dan gradasi hijau menunjukkan variasi Ketahanan Pangan. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari Ketahanan Pangan atau Kerentanan Pangan.

Secara umum, penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Nasional membutuhkan peta dasar batas wilayah dan data hasil analisis Indeks Ketahanan Pangan. Tahapan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional sebagai berikut:

- Mengunggah *file* yang dibutuhkan yaitu peta dasar batas wilayah dan *excel* hasil analisis;
- Penggabungan data atribut dengan data spasial. Kedua *file* yaitu peta dasar batas wilayah dan *excel* hasil analisis perlu memiliki atribut yang sama. Kode wilayah kabupaten/kota diperlukan sebagai atribut kunci untuk menyematkan hasil data Indeks Ketahanan Pangan ke wilayah masing-masing yang sesuai dalam peta dasar;

- Memberikan warna pada setiap wilayah berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Pangan wilayah tersebut. Pewarnaan tersebut dapat menggunakan pola *red*, *green*, dan *blue* seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Pola Pewarnaan Masing-Masing Prioritas

PRIORITAS	KODE WARNA			
	HEX	RED	GREEN	BLUE
INDIKATOR DENGAN 6 KATEGORI				
Prioritas 1	#6e1f1f	110	31	31
Prioritas 2	#e85961	232	89	97
Prioritas 3	#f4a1a7	244	161	167
Prioritas 4	#c9e077	201	224	119
Prioritas 5	#94c945	148	201	69
Prioritas 6	#3b703b	59	112	59
INDIKATOR DENGAN 4 KATEGORI (CONTOH: STUNTING)				
Prioritas 1	#6e1f1f	110	31	31
Prioritas 2	#f4a1a7	244	161	167
Prioritas 3	#c9e077	201	224	119
Prioritas 4	#3b703b	59	112	59

- Memberikan batas dan label nama wilayah provinsi dengan mengunggah peta dasar provinsi; dan
- Merancang tata letak peta dan menambahkan elemen-elemen pada peta seperti arah mata angin, legenda, skala, dan keterangan lainnya sesuai kaidah-kaidah pemetaan.





BAB III

SITUASI KETAHANAN PANGAN INDONESIA

3.1. SITUASI KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

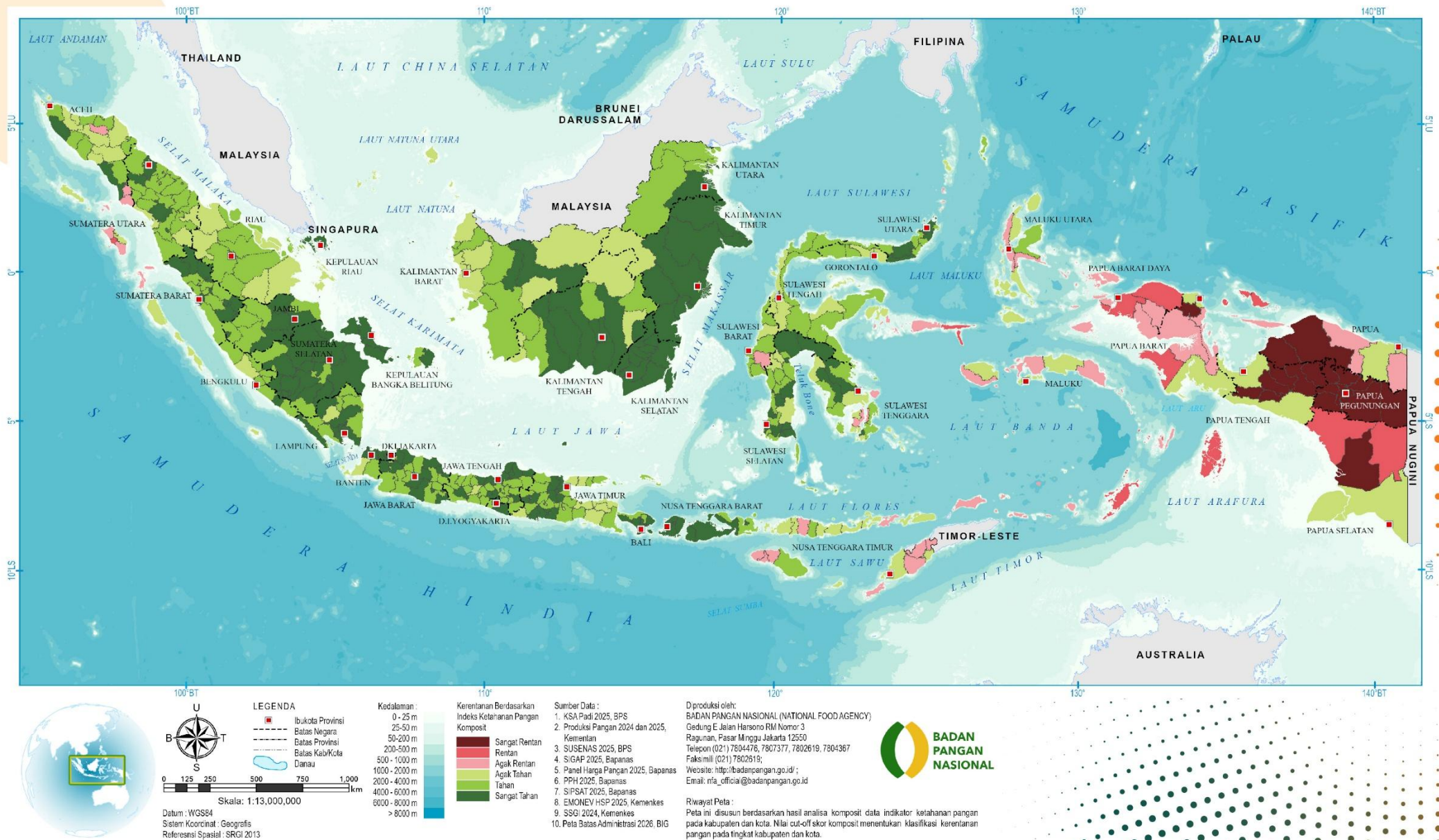
Situasi ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota tahun 2026 di Indonesia menunjukkan jumlah daerah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) kabupaten/kota (86,96% (delapan puluh enam koma sembilan enam persen)), sedangkan rentan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kabupaten/kota (13,04% (tiga belas koma nol empat persen)). Sebaran jumlah kabupaten/kota untuk masing-masing prioritas disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2026

PRIORITAS	PETA 2026
1	18
2	12
3	37
4	92
5	191
6	164
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	67
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	447



GAMBAR 1.
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2026



Daerah rentan rawan pangan sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan seperti ditunjukkan pada Tabel 7. Pulau Papua merupakan wilayah dengan sebaran daerah rentan rawan pangan terbanyak, yaitu sejumlah 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan seluruh kabupaten/kota termasuk daerah rentan rawan pangan. Walaupun telah terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan dibanding tahun 2025, Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terbanyak, yaitu 9 (sembilan) kabupaten/kota atau turun dari tahun 2025 yaitu 18 (delapan belas) kabupaten/kota.

Tabel 7. Sebaran Jumlah Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan di Masing-Masing Provinsi Tahun 2026

NO.	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN/KOTA RENTAN RAWAN PANGAN			
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	TOTAL
1	Aceh	-	-	3	3
2	Sumatera Utara	-	1	2	3
3	Nusa Tenggara Timur	-	-	9	9
4	Sulawesi Utara	-	-	1	1
5	Sulawesi Tengah	-	-	1	1
6	Sulawesi Tenggara	-	-	2	2
7	Sulawesi Barat	-	-	1	1
8	Maluku	-	3	5	8
9	Maluku Utara	-	1	4	5
10	Papua	2	2	3	7
11	Papua Barat	1	1	3	5
12	Papua Selatan	1	2	-	3
13	Papua Tengah	6	-	-	6
14	Papua Pegunungan	8	-	-	8
15	Papua Barat Daya	-	2	3	5
TOTAL					67

Karakteristik kabupaten/kota rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan yang tinggi, rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang rendah, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) yang tinggi, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tinggi, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan yang rendah, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel yang rendah. Perbandingan nilai dari setiap indikator antara daerah rentan dan daerah tahan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Nilai Rata-rata Kelompok Rentan dan Tahan Pangan

NO.	INDIKATOR	DAERAH RENTAN (PRIORITAS 1-3)	DAERAH TAHAN (PRIORITAS 4-6)
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan pisang).	6,69	2,77
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	86,89	98,39
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	70,94	95,53
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4,73	44,18
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	23,35	8,66
6	Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	4,50	3,65
7	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> .	25,27	8,57
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	7,96	9,34
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	50,23	21,84
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	21,09	48,34
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	72,82	90,47
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	32,85	21,20



3.2. PERBANDINGAN SITUASI KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 DAN 2026

Secara umum kondisi ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Daerah rentan rawan pangan menurun dari 81 (delapan puluh satu) kabupaten/kota (15,76% (lima belas koma tujuh puluh enam persen)) menjadi 67 (enam puluh tujuh) kabupaten/kota (13,04% (tiga belas koma nol empat persen)). Daerah rentan rawan pangan prioritas 2 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota. Sementara itu, terlihat peningkatan jumlah kabupaten/kota pada prioritas 6, yaitu dari 106 (seratus enam) kabupaten/kota di 2025 menjadi 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota di 2026. Perubahan situasi ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Sebaran Prioritas Kabupaten/Kota berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025 dan 2026

PRIORITAS	PETA 2025	PETA 2026
1	20	18
2	19	12
3	42	37
4	111	92
5	216	191
6	106	164
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	81	67
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	433	447

Dari 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota terdapat 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota yang mengalami penurunan kelompok prioritas. Lebih jauh, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang mengalami penurunan status dari tahan (prioritas 4-6) menjadi rentan (prioritas 1-3), yaitu Bener Meriah (Provinsi Aceh), Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara), dan Banggai Laut (Provinsi Sulawesi Tengah). Sementara itu, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan status dari rentan (prioritas 1-3) menjadi tahan (prioritas 4-6) sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kupang, Alor, Flores Timur, Sumba Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Sabu Raijua, Malaka, Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Murung Raya (Provinsi Kalimantan Tengah), Muna Barat, Buton Tengah (Provinsi Sulawesi Tenggara), Pasangkayu (Provinsi Sulawesi Barat), Buru (Provinsi Maluku), Halmahera Selatan (Maluku Utara), Nabire (Provinsi Papua Tengah), dan Kota Jayapura (Provinsi Papua). Perubahan status ketahanan pangan kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Kabupaten/Kota yang Mengalami Perubahan Status Ketahanan Pangan

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PETA 2025	PETA 2026
Aceh	Bener Meriah	5	3
Sumatera Utara	Nias Selatan	4	3
Sulawesi Tengah	Banggai Laut	4	3
Nusa Tenggara Timur	Kupang	3	4
Nusa Tenggara Timur	Alor	3	4
Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	3	4
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	3	5
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	3	4
Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	3	4
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	2	4
Nusa Tenggara Timur	Malaka	3	4
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	3	4
Kalimantan Tengah	Murung Raya	3	4
Sulawesi Tenggara	Muna Barat	3	4
Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	3	4
Sulawesi Barat	Pasangkayu	3	5
Maluku	Buru	3	4
Maluku Utara	Halmahera Selatan	3	4
Papua	Kota Jayapura	3	4
Papua Tengah	Nabire	3	4

Situasi ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota secara umum mengalami peningkatan, namun kondisi di daerah rentan rawan pangan masih perlu mendapat fokus penanganan dari lintas sektor. Indikator-indikator yang mengalami penurunan kinerja pada daerah rentan rawan pangan dibanding tahun 2025 adalah rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan, rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel. Perbandingan nilai masing-masing indikator antara tahun 2025 dan 2026 pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Nilai Rata-rata Kelompok Rentan dan Tahan Pangan

NO.	INDIKATOR	DAERAH RENTAN		DAERAH TAHAN	
		2025	2026	2025	2026
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	6,24	6,69	2,80	2,77
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	86,76	86,89	97,68	98,39
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	68,91	70,94	93,11	95,53
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5,24	4,73	44,25	44,18
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	22,26	23,35	9,09	8,66
6	Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	6,62	4,50	5,63	3,65
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	23,99	25,27	8,66	8,57
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 (lima belas) tahun.	7,97	7,96	9,14	9,34
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	50,30	50,23	23,38	21,84
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	23,47	21,09	61,01	48,34
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	71,46	72,82	87,70	90,47
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>).	32,95	32,85	21,08	21,20

3.3. SITUASI KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2026

Pada tingkat provinsi, jumlah daerah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 30 (tiga puluh) provinsi (78,95% (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh lima persen)), sedangkan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 8 (delapan) provinsi (21,05% (dua puluh satu koma nol lima persen)). Sebaran jumlah provinsi untuk masing-masing prioritas disajikan dalam Tabel 12. Selain provinsi yang terletak di Pulau Papua, Provinsi Maluku, dan Maluku Utara merupakan provinsi yang masuk dalam wilayah rentan rawan pangan.

Tabel 12. Sebaran Prioritas Provinsi Tahun 2026

PRIORITAS	PETA 2026
1	2
2	0
3	6
4	1
5	19
6	10
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	8
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	30



3.4. PERBANDINGAN SITUASI KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025 DAN 2026

Secara umum kondisi ketahanan pangan tingkat provinsi tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Daerah rentan rawan pangan menurun dari 9 (sembilan) provinsi (23,68% (dua puluh tiga koma enam puluh delapan persen)) menjadi 8 (delapan) provinsi (21,05% (dua puluh satu koma nol lima persen)). Perubahan situasi ketahanan pangan tingkat provinsi disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Sebaran Prioritas Provinsi berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025 dan 2026

PRIORITAS	PETA 2025	PETA 2026
1	2	2
2	0	0
3	7	6
4	2	1
5	19	19
6	8	10
Kabupaten/Kota Prioritas 1-3	9	8
Kabupaten/Kota Prioritas 4-6	29	30

Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat provinsi yang mengalami penurunan status ketahanan pangan. Sebaliknya terdapat 5 (lima) provinsi mengalami peningkatan status ketahanan pangan yaitu Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang meningkat status ketahanan pangannya dari kelompok rentan rawan pangan (prioritas 3) menjadi kelompok tahan pangan (prioritas 4).







BAB IV

INDEKS KETAHANAN PANGAN INDONESIA

4.1. INDEKS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2026

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan Indeks Ketahanan Pangan dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain.

Indeks Ketahanan Pangan Nasional disusun mulai tahun 2025 dan menjadi indikator kinerja di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Prioritas Nasional-2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru) yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan perhitungan, capaian Indeks Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2026 sebesar 74,91 (tujuh puluh empat koma sembilan satu) dengan rincian untuk aspek ketersediaan pangan memiliki skor sebesar 63,24 (enam puluh tiga koma dua empat); aspek keterjangkauan pangan memiliki skor sebesar 87,94 (delapan puluh tujuh koma sembilan empat); dan aspek pemanfaatan pangan memiliki skor sebesar 73,74 (tujuh puluh tiga koma tujuh empat).

Berdasarkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Kalimantan Selatan dengan skor sebesar 85,41 (delapan puluh lima koma empat satu); Bali dengan skor sebesar 82,15 (delapan puluh dua koma satu lima); DI Yogyakarta dengan skor sebesar 82,02 (delapan puluh dua koma nol dua); Nusa Tenggara Barat dengan skor sebesar 81,10 (delapan puluh satu koma satu nol); dan Kalimantan Timur dengan skor sebesar 80,31 (delapan puluh koma tiga satu). Sedangkan 5 (lima) provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua Pegunungan dengan skor sebesar 36,49 (tiga puluh enam koma empat sembilan); Papua Tengah dengan skor sebesar 44,49 (empat puluh empat koma empat sembilan); Papua Selatan dengan skor sebesar 56,85 (lima puluh enam koma delapan lima); Papua Barat Daya dengan skor sebesar 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam); dan Papua Barat dengan skor sebesar 58,23 (lima puluh delapan koma dua tiga).

Berdasarkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, 5 (lima) kabupaten/kota dengan urutan skor paling tinggi adalah Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan skor sebesar 93,00 (sembilan puluh tiga); Kota Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan dengan skor sebesar 90,13 (sembilan puluh koma satu tiga); Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan dengan skor sebesar 89,51 (delapan puluh sembilan koma lima satu); Kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta dengan skor sebesar 89,29 (delapan puluh sembilan koma dua sembilan); dan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan skor sebesar 89,25 (delapan puluh sembilan koma dua lima). Sedangkan 5 (lima) kabupaten dengan urutan skor paling rendah adalah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah dengan skor sebesar 20,43 (dua puluh koma empat tiga); Kabupaten Nduga di Provinsi Papua Pegunungan dengan skor sebesar 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan dua); Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan dengan skor sebesar 29,36 (dua puluh sembilan koma tiga enam); Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah dengan skor sebesar 31,16 (tiga puluh satu koma satu enam), dan Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan dengan skor sebesar 31,76 (tiga puluh satu koma tujuh enam).

4.2. PERBANDINGAN INDEKS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025 DAN 2026

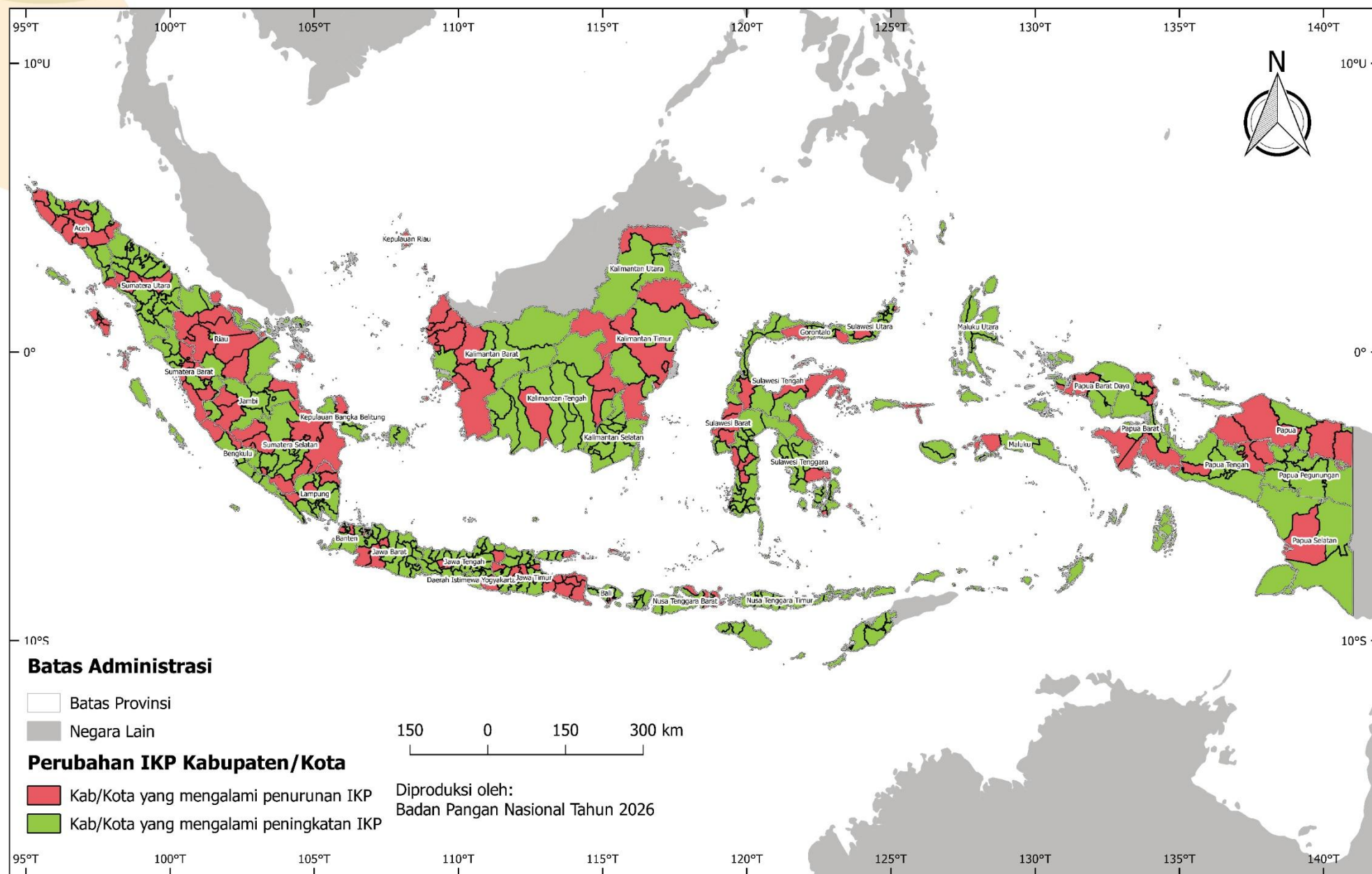
Skor Indeks Ketahanan Pangan Nasional tahun 2026 (74,91 (tujuh puluh empat koma sembilan satu)) meningkat 1,91 (satu koma sembilan satu) poin dibandingkan tahun 2025 (73,00 (tujuh puluh tiga)). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya skor aspek keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Sedangkan aspek pemanfaatan mengalami sedikit penurunan.

Pada tingkat kabupaten/kota, sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) kabupaten/kota (70,82% (tujuh puluh koma delapan dua persen)) mengalami peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dan 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota (29,18% (dua puluh sembilan koma satu delapan persen)) mengalami penurunan Indeks Ketahanan Pangan. Secara umum, penurunan Indeks Ketahanan Pangan disebabkan oleh penurunan skor untuk indikator persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar, rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang dimiliki terhadap CBPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan. Perubahan Indeks Ketahanan Pangan setiap kabupaten/kota disajikan dalam Gambar 2.

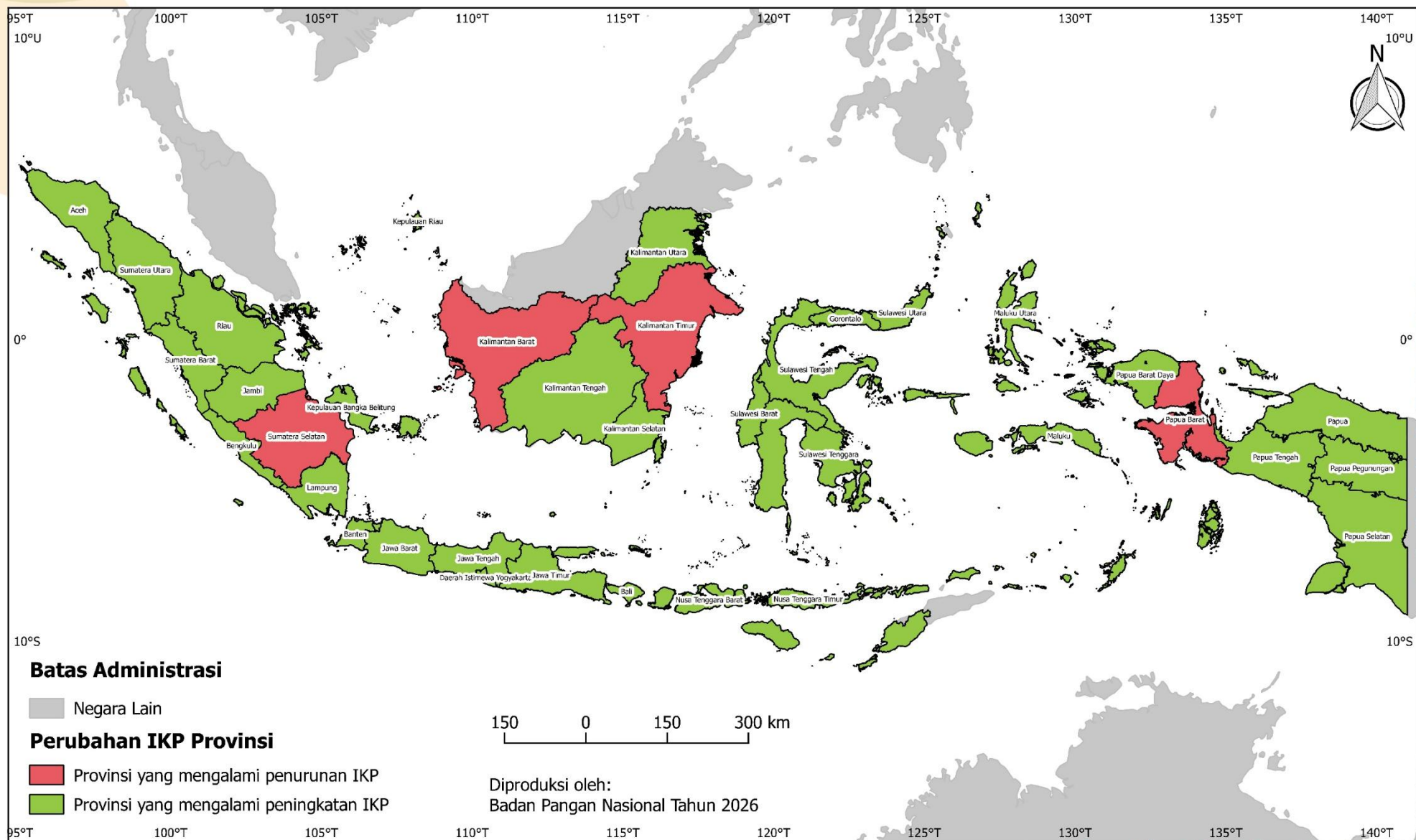
Pada tingkat provinsi, sebanyak 34 (tiga puluh empat) provinsi (89,47% (delapan puluh sembilan koma empat tujuh persen)) mengalami peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dan 4 (empat) provinsi (10,53% (sepuluh koma lima tiga persen)) mengalami penurunan Indeks Ketahanan Pangan. Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Ketahanan Pangan yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Perubahan Indeks Ketahanan Pangan setiap provinsi disajikan dalam Gambar 3.

GAMBAR 2.

PETA PERUBAHAN INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 DAN 2026



GAMBAR 3.
PETA PERUBAHAN INDEKS KETAHANAN PANGAN PROVINSI TAHUN 2025 DAN 2026





BAB V REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sebagai preskripsi untuk membangun daerah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan, direkomendasikan implementasi program dan kegiatan terhadap peningkatan ketahanan pangan bagi:

1. kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua dengan jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak;
2. kabupaten/kota di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan; dan
3. kabupaten/kota yang mengalami masalah ketersediaan pangan tinggi, tingkat Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) yang masih berada di bawah rasio minimum yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggi, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan yang rendah, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel yang rendah.

Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

1. Permasalahan utama aspek ketersediaan pangan adalah terbatasnya jumlah produksi untuk mencukupi permintaan konsumsi penduduk, rendahnya cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan rendahnya ketersediaan protein. Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan program dan kegiatan:
 - a. peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis potensi serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan, termasuk teknologi pertanian digital;
 - b. peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah (CPP provinsi, kabupaten/kota, desa) dan penguatan lumbung pangan masyarakat untuk pangan pokok beras dan pangan berbasis sumber daya lokal; terutama di wilayah kepulauan yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan;
 - c. fasilitasi dan intensifikasi pemanfaatan area pekarangan, kebun, lahan tidur, lahan marginal, dan talun untuk penyediaan pangan di rumah tangga dan komunitas setempat;

- d. peningkatan ketersediaan sumber pangan hewani melalui peningkatan produksi hasil peternakan dan perikanan, termasuk pengembangan usaha peternakan dan perikanan skala rumah tangga dan kelompok usaha;
 - e. pengelolaan keluar masuk barang dari dan ke wilayah lain (perdagangan antar daerah) untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk;
 - f. pencegahan dan penanganan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) di sepanjang rantai pasok pangan; dari panen di tingkat usaha tani sampai dengan konsumsi di tingkat rumah tangga (*from farm to table*); dan
 - g. kajian dan diseminasi hasil penelitian dan implementasi pertanian pintar dan cerdas iklim (*smart and climate farming*) untuk peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
2. Permasalahan utama aspek keterjangkauan pangan adalah tingginya angka PoU dan terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan program dan kegiatan:
- a. pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui: a) pemerataan ketersediaan pangan antarwaktu antarwilayah termasuk di daerah rentan rawan pangan; dan b) penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen;
 - b. perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah;
 - d. pemanfaatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi;
 - e. fasilitasi distribusi pangan yang lebih merata antarwilayah dan antarwaktu;
 - f. peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi;
 - g. fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) dan mengoptimalkan integrasi usaha UMKM/BUMDES dengan penyerapan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - h. penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal;
 - i. pembangunan infrastruktur dasar (terutama berupa jalan usahatani, irigasi, listrik, jaringan internet) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah; dan
 - j. secara khusus dalam upaya menurunkan nilai PoU guna memperbaiki aspek keterjangkauan pangan memerlukan upaya yang sistematis dan komprehensif yang diklasifikasikan kepada 5 (lima) klaster utama yaitu: (1) edukasi dan literasi terkait dengan pemenuhan gizi masyarakat; (2) penguatan produksi dan diversifikasi pangan

lokal; (3) penguatan jaminan sosial masyarakat; (4) pemberian makanan tambahan untuk masyarakat; dan (5) perbaikan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas.

3. Permasalahan utama aspek pemanfaatan pangan adalah rendahnya persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) terhadap total sampel dan masih tingginya prevalensi balita *stunting* serta masih rendahnya skor pola pangan harapan sebagai indikator mutu gizi konsumsi pangan. Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan program dan/atau kegiatan:
 - a. penjaminan keamanan dan mutu pangan baik secara regulasi dan pengujian laboratorium;
 - b. penguatan peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan dalam proses produksi dan pengembangan industri pangan lokal;
 - c. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku konsumsi pangan serta pemenuhan konsumsi pangan untuk mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - d. penurunan prevalensi balita *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (terutama untuk kelompok 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga);
 - e. peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi lingkungan dan higienitas perorangan;
 - f. peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan; dan
 - g. pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan.

Sinergi lintas sektor dan koordinasi pusat-daerah sangat diperlukan untuk membangun sistem pangan berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mencegah serta menangani potensi kerentanan rawan pangan. Dukungan kerjasama sinergis antarpihak dari unsur *Academic, Business, Community, Government, and Media* (ABCGM) akan mampu mengoptimalkan dukungan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya alam, sumber dana, dan sumber daya manusia dalam menangani kerawanan pangan dan mencapai target *Sustainable Development Goals*, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan). Kementerian koordinator bidang pangan memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengolaborasikan berbagai program dan intervensi lintas kementerian/lembaga dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait Indeks Ketahanan Pangan.

Diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan regulasi ketahanan pangan, dukungan anggaran yang berkelanjutan, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi dan program inovatif untuk menangani kerawanan pangan dengan memanfaatkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional dan wilayah hingga tingkat desa.

Tabel 14. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2026

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
ACEH							
1	Aceh Selatan	87,48	83,53	62,21	77,71	149	6
2	Aceh Tenggara	61,82	84,46	66,06	70,71	336	5
3	Aceh Timur	57,53	81,12	59,83	66,09	409	4
4	Aceh Tengah	61,19	81,20	65,18	69,13	369	4
5	Aceh Barat	70,05	80,05	66,15	72,05	296	5
6	Aceh Besar	61,26	84,00	70,89	71,99	298	5
7	Pidie	58,56	83,86	63,39	68,53	379	4
8	Aceh Utara	65,21	77,39	69,38	70,63	339	5
9	Simeulue	56,45	77,52	62,03	65,27	418	4
10	Aceh Singkil	31,64	76,58	58,47	55,46	478	3
11	Bireuen	73,69	78,10	65,54	72,42	286	5
12	Aceh Barat Daya	59,83	74,88	61,08	65,22	419	4
13	Gayo Lues	61,63	74,76	66,41	67,56	396	4
14	Aceh Jaya	88,57	84,76	64,54	79,26	117	6
15	Nagan Raya	69,73	79,74	68,56	72,64	280	5
16	Aceh Tamiang	78,49	80,48	69,14	76,01	197	5
17	Bener Meriah	42,63	80,70	60,05	61,03	451	3
18	Pidie Jaya	63,68	71,91	62,25	65,92	412	4
19	Kota Banda Aceh	61,65	87,92	77,52	75,63	207	5
20	Kota Sabang	43,81	81,54	75,68	66,94	402	4
21	Kota Lhokseumawe	52,16	85,08	76,08	71,03	330	5
22	Kota Langsa	53,57	85,47	75,83	71,55	310	5
23	Kota Subulussalam	34,58	82,28	60,16	58,89	460	3

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
SUMATERA UTARA							
24	Tapanuli Tengah	61,38	83,10	63,21	69,16	368	4
25	Tapanuli Utara	91,24	90,37	61,77	81,08	65	6
26	Tapanuli Selatan	64,04	93,01	64,72	73,83	255	5
27	Nias	54,69	83,66	51,07	63,04	435	4
28	Langkat	56,42	87,11	71,26	71,52	311	5
29	Karo	92,48	91,01	71,09	84,83	21	6
30	Deli Serdang	64,44	94,95	83,64	80,94	67	6
31	Simalungun	64,92	86,39	69,12	73,41	262	5
32	Asahan	68,41	86,49	71,01	75,24	223	5
33	Labuhanbatu	62,28	89,28	71,10	74,14	244	5
34	Dairi	62,05	91,82	64,80	72,80	276	5
35	Toba	72,59	90,99	66,66	76,68	178	5
36	Mandailing Natal	62,45	89,21	60,73	70,71	337	5
37	Nias Selatan	52,23	73,59	47,89	57,82	469	3
38	Pakpak Bharat	59,36	91,69	59,95	70,23	344	5
39	Humbang Hasundutan	75,19	89,42	67,57	77,33	165	5
40	Samosir	74,12	88,48	65,88	76,10	195	5
41	Serdang Bedagai	62,07	89,65	69,36	73,61	258	5
42	Batu Bara	58,67	85,75	65,29	69,82	352	5
43	Padang Lawas Utara	66,11	87,83	61,24	71,65	307	5
44	Padang Lawas	58,04	87,01	63,48	69,42	358	4
45	Labuhanbatu Selatan	48,24	91,20	68,62	69,25	366	4
46	Labuhanbatu Utara	64,31	88,85	63,65	72,19	295	5
47	Nias Utara	52,13	72,39	57,73	60,69	453	3

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
48	Nias Barat	49,99	61,13	45,99	52,33	486	2
49	Kota Medan	41,67	87,58	80,61	69,87	350	5
50	Kota Pematangsiantar	60,19	89,58	79,26	76,28	191	5
51	Kota Sibolga	37,48	79,17	73,17	63,19	432	4
52	Kota Tanjungbalai	43,69	83,67	81,18	69,44	357	4
53	Kota Binjai	56,79	88,42	73,17	72,72	278	5
54	Kota Tebing Tinggi	60,06	86,99	76,52	74,46	239	5
55	Kota Padangsidimpuan	77,21	88,65	67,01	77,57	155	6
56	Kota Gunungsitoli	52,45	78,91	69,17	66,78	403	4
SUMATERA BARAT							
57	Pesisir Selatan	61,19	87,87	75,00	74,62	236	5
58	Solok	63,00	87,02	71,85	73,90	253	5
59	Sijunjung	68,61	84,78	74,64	75,97	198	5
60	Tanah Datar	67,35	86,11	73,92	75,74	204	5
61	Padang Pariaman	65,41	88,35	67,32	73,62	257	5
62	Agam	63,95	87,30	76,72	75,93	199	5
63	Lima Puluah Kota	85,23	87,61	64,76	79,16	120	6
64	Pasaman	77,74	89,71	73,10	80,13	88	6
65	Kepulauan Mentawai	69,57	78,69	55,96	68,02	393	4
66	Dharmasraya	71,72	91,32	78,46	80,45	83	6
67	Solok Selatan	73,18	87,44	75,02	78,50	135	6
68	Pasaman Barat	80,76	89,01	72,76	80,80	69	6
69	Kota Padang	76,48	88,04	82,23	82,22	46	6
70	Kota Solok	84,93	88,99	87,12	87,00	10	6
71	Kota Sawahlunto	80,72	90,68	79,71	83,67	28	6

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
72	Kota Padang Panjang	72,37	90,69	73,98	78,96	127	6
73	Kota Bukittinggi	65,14	87,51	84,46	78,99	124	6
74	Kota Payakumbuh	85,46	88,05	83,57	85,68	17	6
75	Kota Pariaman	69,52	89,83	79,65	79,62	103	6
RIAU							
76	Kampar	58,01	86,23	71,35	71,79	306	5
77	Indragiri Hulu	34,16	85,92	68,13	62,62	441	4
78	Bengkalis	71,03	82,41	78,02	77,13	170	5
79	Indragiri Hilir	60,23	87,17	57,22	68,11	392	4
80	Pelalawan	60,40	87,01	71,11	72,77	277	5
81	Rokan Hulu	36,61	82,16	68,97	62,48	442	4
82	Rokan Hilir	56,10	87,48	64,63	69,31	363	4
83	Siak	56,58	88,16	75,52	73,34	265	5
84	Kuantan Singingi	53,86	90,17	76,40	73,39	263	5
85	Kepulauan Meranti	66,89	77,52	53,69	65,98	411	4
86	Kota Pekanbaru	43,82	91,47	81,76	72,26	294	5
87	Kota Dumai	55,11	93,35	73,62	73,93	252	5
JAMBI							
88	Kerinci	65,06	84,25	70,35	73,16	269	5
89	Merangin	55,81	87,28	72,76	71,87	301	5
90	Sarolangun	75,55	87,50	79,12	80,69	72	6
91	Batanghari	70,32	87,93	74,82	77,64	153	6
92	Muaro Jambi	79,17	88,17	75,28	80,84	68	6
93	Tanjung Jabung Barat	75,52	86,43	71,89	77,90	143	6
94	Tanjung Jabung Timur	78,07	85,88	66,94	76,92	172	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
95	Bungo	73,44	90,39	66,33	76,65	180	5
96	Tebo	68,23	89,10	72,95	76,70	177	5
97	Kota Jambi	62,68	89,14	90,10	80,60	78	6
98	Kota Sungai Penuh	69,72	90,73	84,63	81,65	53	6
SUMATERA SELATAN							
99	Ogan Komering Ulu	72,72	88,69	74,41	78,55	134	6
100	Ogan Komering Ilir	78,12	84,63	70,42	77,69	151	6
101	Muara Enim	84,68	89,42	79,04	84,35	24	6
102	Lahat	77,87	86,82	77,45	80,69	73	6
103	Musi Rawas	87,75	85,72	68,18	80,53	80	6
104	Musi Banyuasin	79,34	88,17	79,16	82,20	47	6
105	Banyuasin	89,84	83,31	73,94	82,36	43	6
106	Ogan Komering Ulu Timur	76,64	89,59	78,82	81,64	55	6
107	Ogan Komering Ulu Selatan	59,55	87,34	70,63	72,43	285	5
108	Ogan Ilir	70,89	85,83	71,98	76,18	194	5
109	Empat Lawang	83,10	84,71	64,48	77,39	162	6
110	Penukal Abab Lematang Ilir	79,82	87,08	71,75	79,52	109	6
111	Musi Rawas Utara	62,44	83,32	70,54	72,04	297	5
112	Kota Palembang	55,44	89,78	91,30	78,79	131	6
113	Kota Pagar Alam	84,70	90,91	74,57	83,35	33	6
114	Kota Lubuk Linggau	57,58	85,93	78,21	73,84	254	5
115	Kota Prabumulih	53,72	89,22	80,32	74,35	240	5
BENGKULU							
116	Bengkulu Selatan	83,37	83,92	71,32	79,51	110	6
117	Rejang Lebong	78,84	84,84	65,72	76,43	187	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
118	Bengkulu Utara	53,45	84,70	68,97	68,96	372	4
119	Kaur	59,24	84,84	72,89	72,26	293	5
120	Seluma	74,67	81,29	75,10	77,00	171	5
121	Mukomuko	69,08	85,91	72,18	75,67	206	5
122	Lebong	65,73	83,56	67,83	72,32	292	5
123	Kepahiang	61,54	87,39	69,88	72,86	273	5
124	Bengkulu Tengah	75,21	86,29	63,50	74,94	228	5
125	Kota Bengkulu	34,91	88,43	83,81	68,95	373	4
LAMPUNG							
126	Lampung Selatan	83,53	87,67	80,03	83,72	27	6
127	Lampung Tengah	67,12	87,64	77,52	77,38	163	6
128	Lampung Utara	53,88	84,49	58,05	65,38	417	4
129	Lampung Barat	77,30	87,62	63,85	76,20	193	5
130	Tulang Bawang	56,35	90,57	68,07	71,57	309	5
131	Tanggamus	59,90	88,04	66,14	71,28	325	5
132	Lampung Timur	58,63	85,80	68,65	70,95	332	5
133	Way Kanan	83,35	87,77	72,96	81,33	62	6
134	Pesawaran	72,11	88,09	77,59	79,22	119	6
135	Pringsewu	77,76	88,65	78,46	81,59	59	6
136	Mesuji	55,12	91,29	67,20	71,10	329	5
137	Tulang Bawang Barat	74,41	89,30	62,80	75,44	214	5
138	Pesisir Barat	83,61	87,47	66,97	79,31	115	6
139	Kota Bandar Lampung	55,85	91,33	78,09	75,01	227	5
140	Kota Metro	80,63	90,69	79,75	83,65	29	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
KEP. BANGKA BELITUNG							
141	Bangka	81,20	89,73	70,77	80,52	81	6
142	Belitung	63,33	88,27	75,66	75,69	205	5
143	Bangka Selatan	73,46	90,14	75,94	79,79	98	6
144	Bangka Tengah	70,74	86,64	76,84	78,03	140	6
145	Bangka Barat	75,28	93,81	78,31	82,41	41	6
146	Belitung Timur	69,21	90,11	78,93	79,36	113	6
147	Kota Pangkal Pinang	61,40	92,06	85,99	79,76	99	6
KEP. RIAU							
148	Bintan	61,95	90,73	79,69	77,39	161	6
149	Karimun	48,29	88,09	76,75	70,96	331	5
150	Natuna	50,45	82,98	71,57	68,26	389	4
151	Lingga	38,42	79,83	71,33	63,11	434	4
152	Kepulauan Anambas	58,38	81,85	67,59	69,21	367	4
153	Kota Batam	64,14	93,15	83,38	80,16	87	6
154	Kota Tanjung Pinang	66,03	91,73	80,14	79,24	118	6
DKI JAKARTA							
155	Adm. Kepulauan Seribu	40,81	88,01	79,63	69,39	359	4
156	Kota Adm. Jakarta Pusat	38,06	92,48	84,02	71,41	315	5
157	Kota Adm. Jakarta Utara	42,34	90,76	82,60	71,80	305	5
158	Kota Adm. Jakarta Barat	38,39	92,04	83,34	71,15	327	5
159	Kota Adm. Jakarta Selatan	41,73	96,46	87,58	75,15	225	5
160	Kota Adm. Jakarta Timur	38,68	95,35	86,63	73,45	260	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
JAWA BARAT							
161	Bogor	77,41	92,78	72,15	80,72	71	6
162	Sukabumi	61,92	91,59	69,08	74,11	246	5
163	Cianjur	59,31	89,58	71,46	73,37	264	5
164	Bandung	78,59	90,65	77,21	82,11	48	6
165	Garut	77,76	89,05	70,75	79,14	121	6
166	Tasikmalaya	60,27	86,17	67,99	71,40	316	5
167	Ciamis	66,50	91,10	73,03	76,81	176	5
168	Kuningan	55,93	88,60	68,47	70,91	333	5
169	Cirebon	76,53	89,48	75,63	80,50	82	6
170	Majalengka	57,42	89,54	70,30	72,33	291	5
171	Sumedang	77,22	90,96	76,89	81,65	54	6
172	Indramayu	77,20	86,52	76,15	79,92	92	6
173	Subang	70,46	88,76	70,31	76,45	186	5
174	Purwakarta	60,44	90,09	72,32	74,20	243	5
175	Karawang	68,60	89,71	74,87	77,67	152	6
176	Bekasi	72,90	85,68	84,80	81,10	63	6
177	Bandung Barat	67,84	87,81	67,46	74,30	241	5
178	Pangandaran	75,82	92,36	70,74	79,57	105	6
179	Kota Bogor	39,33	92,52	83,94	71,83	303	5
180	Kota Sukabumi	74,34	92,16	72,31	79,54	107	6
181	Kota Bandung	53,67	92,87	79,49	75,26	222	5
182	Kota Cirebon	56,22	88,53	88,01	77,53	157	6
183	Kota Bekasi	52,97	95,09	82,94	76,91	174	5
184	Kota Depok	43,53	94,24	76,70	71,38	320	5

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
185	Kota Cimahi	57,40	91,49	78,15	75,60	208	5
186	Kota Tasikmalaya	81,10	90,35	73,38	81,57	60	6
187	Kota Banjar	91,24	89,99	74,73	85,30	18	6
JAWA TENGAH							
188	Cilacap	58,85	87,61	75,74	74,00	251	5
189	Banyumas	66,74	86,86	79,20	77,55	156	6
190	Purbalingga	64,16	84,25	68,87	72,37	289	5
191	Banjarnegara	52,45	81,27	71,74	68,42	382	4
192	Kebumen	60,40	85,93	78,00	74,72	233	5
193	Purworejo	54,33	85,69	74,04	71,28	324	5
194	Wonosobo	63,53	83,53	79,14	75,36	219	5
195	Magelang	71,36	86,52	79,19	78,99	125	6
196	Boyolali	56,01	87,57	78,86	74,08	248	5
197	Klaten	61,08	87,59	78,96	75,82	202	5
198	Sukoharjo	54,43	87,95	82,59	74,92	229	5
199	Wonogiri	58,80	87,17	80,44	75,41	215	5
200	Karanganyar	63,77	91,50	80,91	78,66	132	6
201	Sragen	60,10	87,16	83,64	76,92	173	5
202	Grobogan	58,72	86,80	82,14	75,83	201	5
203	Blora	60,50	85,71	73,17	73,06	271	5
204	Rembang	69,50	84,70	83,20	79,10	122	6
205	Pati	75,94	89,81	73,85	79,82	96	6
206	Kudus	64,44	91,33	86,37	80,66	75	6
207	Jepara	81,95	90,49	79,31	83,89	26	6
208	Demak	62,19	87,97	86,40	78,81	130	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
209 Semarang	53,64	91,40	79,63	74,81	230	5
210 Temanggung	44,49	89,46	75,69	69,78	353	5
211 Kendal	67,40	89,48	83,33	80,02	89	6
212 Batang	88,63	91,59	76,99	85,71	16	6
213 Pekalongan	60,65	91,64	75,32	75,79	203	5
214 Pemasang	63,78	86,62	75,60	75,28	221	5
215 Tegal	57,27	90,18	70,47	72,55	283	5
216 Brebes	68,13	85,48	77,08	76,86	175	5
217 Kota Magelang	44,46	92,25	85,89	74,11	247	5
218 Kota Surakarta	54,12	90,44	88,98	77,79	147	6
219 Kota Salatiga	66,09	92,89	83,07	80,62	77	6
220 Kota Semarang	46,42	95,08	87,88	76,36	188	5
221 Kota Pekalongan	57,46	91,49	81,29	76,67	179	5
222 Kota Tegal	33,19	92,55	85,09	70,16	345	5
DI YOGYAKARTA						
223 Kulon Progo	60,20	83,52	80,53	74,70	234	5
224 Bantul	69,91	85,57	82,89	79,43	111	6
225 Gunungkidul	78,84	86,23	76,61	80,53	79	6
226 Sleman	89,76	90,17	88,25	89,39	4	6
227 Kota Yogyakarta	58,15	91,01	84,11	77,69	150	6
JAWA TIMUR						
228 Pacitan	57,76	84,09	66,32	69,32	362	4
229 Ponorogo	53,62	87,24	79,61	73,42	261	5
230 Trenggalek	79,25	86,27	74,22	79,88	94	6
231 Tulungagung	76,11	90,32	71,82	79,36	114	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
232	Blitar	67,26	89,60	77,54	78,08	139	6
233	Kediri	49,71	86,28	75,57	70,44	343	5
234	Malang	73,43	86,77	69,49	76,51	184	5
235	Lumajang	62,50	88,56	66,67	72,49	284	5
236	Jember	53,37	83,07	61,89	66,03	410	4
237	Banyuwangi	59,36	90,00	68,70	72,60	281	5
238	Bondowoso	56,54	83,18	68,24	69,25	365	4
239	Situbondo	55,25	82,49	66,01	67,84	395	4
240	Probolinggo	55,68	80,50	62,65	66,21	408	4
241	Pasuruan	59,19	87,38	68,55	71,63	308	5
242	Sidoarjo	53,61	91,29	83,61	76,10	196	5
243	Mojokerto	82,62	89,71	76,70	82,98	36	6
244	Jombang	76,10	88,15	74,01	79,38	112	6
245	Nganjuk	55,09	86,93	70,35	70,71	335	5
246	Madiun	78,09	85,21	75,49	79,57	106	6
247	Magetan	80,00	87,99	76,92	81,60	57	6
248	Ngawi	62,58	84,36	75,92	74,24	242	5
249	Bojonegoro	54,88	87,35	77,25	73,09	270	5
250	Tuban	58,61	84,31	79,39	74,05	250	5
251	Lamongan	66,62	89,09	78,42	77,99	141	6
252	Gresik	67,18	89,83	80,02	78,96	126	6
253	Bangkalan	57,92	80,88	61,31	66,63	404	4
254	Sampang	57,36	77,36	59,18	64,57	422	4
255	Pamekasan	57,46	87,33	65,44	69,99	349	5
256	Sumenep	65,42	81,96	71,18	72,81	275	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
257	Kota Kediri	27,18	91,42	75,44	64,55	423	4
258	Kota Blitar	46,20	90,87	75,41	70,72	334	5
259	Kota Malang	28,66	93,68	77,35	66,43	405	4
260	Kota Probolinggo	51,32	91,42	86,47	76,33	189	5
261	Kota Pasuruan	49,48	89,99	80,50	73,24	267	5
262	Kota Mojokerto	58,60	92,69	80,59	77,22	168	5
263	Kota Madiun	50,74	92,65	82,84	75,32	220	5
264	Kota Surabaya	42,59	95,89	86,11	74,76	231	5
265	Kota Batu	51,74	93,11	69,61	71,38	319	5
BANTEN							
266	Pandeglang	56,43	88,27	61,87	68,76	376	4
267	Lebak	79,73	91,37	58,69	76,52	183	5
268	Tangerang	81,64	92,56	76,43	83,50	31	6
269	Serang	78,27	95,81	71,47	81,78	51	6
270	Kota Tangerang	66,23	93,87	85,45	81,79	50	6
271	Kota Cilegon	61,49	94,20	84,08	79,85	95	6
272	Kota Serang	78,77	94,55	75,22	82,79	37	6
273	Kota Tangerang Selatan	58,84	92,89	80,75	77,42	160	6
BALI							
274	Jembrana	68,24	90,38	84,53	81,00	66	6
275	Tabanan	71,94	95,69	80,71	82,71	40	6
276	Badung	92,01	97,44	89,63	93,00	1	6
277	Gianyar	65,66	94,32	88,51	82,78	39	6
278	Klungkung	68,44	91,26	82,38	80,64	76	6
279	Bangli	56,71	94,81	76,45	75,90	200	5

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
280	Karangasem	74,44	91,00	72,53	79,26	116	6
281	Buleleng	59,72	92,65	79,75	77,30	166	5
282	Kota Denpasar	61,96	96,74	91,66	83,39	32	6
NUSA TENGGARA BARAT							
283	Lombok Barat	86,23	88,08	70,80	81,67	52	6
284	Lombok Tengah	86,69	88,08	74,86	83,19	35	6
285	Lombok Timur	77,12	89,41	72,35	79,58	104	6
286	Sumbawa	75,35	84,16	74,81	78,08	138	6
287	Dompu	75,46	91,12	72,72	79,71	101	6
288	Bima	75,88	87,38	68,48	77,20	169	5
289	Sumbawa Barat	95,60	90,07	82,10	89,25	5	6
290	Lombok Utara	94,54	79,82	66,71	80,36	84	6
291	Kota Mataram	83,68	90,98	79,58	84,72	23	6
292	Kota Bima	87,55	93,86	76,49	85,93	14	6
NUSA TENGGARA TIMUR							
293	Kupang	49,45	79,22	57,13	61,85	443	4
294	Timor Tengah Selatan	44,54	77,90	49,03	57,05	472	3
295	Timor Tengah Utara	46,07	79,78	58,43	61,33	448	3
296	Belu	42,76	85,64	48,40	58,80	462	3
297	Alor	52,39	81,61	55,01	62,91	436	4
298	Flores Timur	53,21	84,25	68,17	68,47	380	4
299	Sikka	53,35	84,11	61,98	66,39	406	4
300	Ende	46,12	80,04	64,22	63,38	430	4
301	Ngada	56,50	86,40	70,68	71,12	328	5
302	Manggarai	52,80	80,43	59,10	64,03	426	4

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
303	Sumba Timur	84,22	76,86	62,99	74,68	235	5
304	Sumba Barat	43,13	76,44	58,26	59,19	459	3
305	Lembata	42,02	75,27	55,86	57,63	470	3
306	Rote Ndao	43,04	73,42	60,28	58,84	461	3
307	Manggarai Barat	60,77	83,97	61,23	68,58	378	4
308	Nagekeo	52,75	83,43	65,58	67,18	399	4
309	Sumba Tengah	50,28	60,72	55,22	55,38	480	3
310	Sumba Barat Daya	44,47	76,66	42,67	54,49	483	3
311	Manggarai Timur	52,54	78,05	53,05	61,13	449	3
312	Sabu Raijua	55,12	74,54	61,52	63,67	428	4
313	Malaka	45,52	84,47	58,80	62,82	438	4
314	Kota Kupang	23,01	88,96	73,21	61,59	447	4
KALIMANTAN BARAT							
315	Sambas	62,75	85,65	49,59	65,90	413	4
316	Mempawah	64,23	87,35	55,54	68,95	374	4
317	Sanggau	72,80	88,45	58,84	73,29	266	5
318	Ketapang	61,54	88,31	65,93	71,84	302	5
319	Sintang	75,62	88,95	68,81	77,74	148	6
320	Kapuas Hulu	49,95	86,03	69,35	68,35	386	4
321	Bengkayang	55,80	88,82	67,64	70,66	338	5
322	Landak	60,47	85,53	55,68	67,14	400	4
323	Sekadau	82,77	90,21	66,09	79,64	102	6
324	Melawi	70,17	81,66	55,69	69,11	370	4
325	Kayong Utara	77,58	87,17	59,15	74,57	237	5
326	Kubu Raya	66,06	86,81	52,54	68,38	384	4

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
327	Kota Pontianak	61,89	92,68	71,91	75,41	216	5
328	Kota Singkawang	77,40	92,43	60,25	76,61	181	5
KALIMANTAN TENGAH							
329	Kotawaringin Barat	50,72	91,42	84,55	75,48	212	5
330	Kotawaringin Timur	74,12	90,25	69,22	77,80	146	6
331	Kapuas	88,32	87,58	71,23	82,35	44	6
332	Barito Selatan	52,40	88,08	61,06	67,08	401	4
333	Barito Utara	53,53	89,60	71,10	71,32	322	5
334	Katingan	78,84	91,58	69,48	79,91	93	6
335	Seruyan	84,25	89,31	67,11	80,18	86	6
336	Sukamara	45,79	91,39	70,98	69,28	364	4
337	Lamandau	53,60	95,46	73,66	74,14	245	5
338	Gunung Mas	59,37	91,61	66,52	72,41	287	5
339	Pulang Pisau	94,53	91,38	68,58	84,80	22	6
340	Murung Raya	43,14	89,00	63,58	65,12	420	4
341	Barito Timur	71,86	92,77	70,08	78,16	137	6
342	Kota Palangkaraya	60,55	94,84	80,32	78,49	136	6
KALIMANTAN SELATAN							
343	Tanah Laut	90,27	95,25	73,77	86,39	12	6
344	Kotabaru	85,43	93,42	76,72	85,15	19	6
345	Banjar	93,04	95,52	73,49	87,31	9	6
346	Barito Kuala	91,93	91,48	71,47	84,93	20	6
347	Tapin	93,63	96,78	78,24	89,51	3	6
348	Hulu Sungai Selatan	94,67	93,18	75,38	87,71	8	6
349	Hulu Sungai Tengah	98,76	93,33	74,84	88,96	7	6

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
350	Hulu Sungai Utara	79,29	91,50	74,99	81,88	49	6
351	Tabalong	93,66	95,65	81,15	90,13	2	6
352	Tanah Bumbu	90,67	95,07	74,40	86,67	11	6
353	Balangan	94,13	91,78	81,68	89,18	6	6
354	Kota Banjarmasin	62,91	93,38	83,71	79,93	91	6
355	Kota Banjarbaru	63,22	93,02	85,95	80,67	74	6
KALIMANTAN TIMUR							
356	Paser	84,23	85,20	71,44	80,27	85	6
357	Kutai Kartanegara	88,52	88,12	81,17	85,93	15	6
358	Berau	75,09	89,63	71,88	78,81	129	6
359	Kutai Barat	81,12	88,04	77,93	82,33	45	6
360	Kutai Timur	83,66	87,67	73,11	81,45	61	6
361	Penajam Paser Utara	84,49	87,74	77,63	83,27	34	6
362	Mahakam Ulu	47,20	84,78	65,09	65,60	416	4
363	Kota Balikpapan	60,64	94,33	77,69	77,47	159	6
364	Kota Samarinda	61,42	89,17	79,08	76,49	185	5
365	Kota Bontang	61,00	93,61	78,10	77,49	158	6
KALIMANTAN UTARA							
366	Bulungan	87,84	83,02	74,02	81,62	56	6
367	Malinau	57,03	90,44	67,02	71,40	317	5
368	Nunukan	65,07	88,51	68,80	74,06	249	5
369	Tana Tidung	51,86	89,06	77,85	72,85	274	5
370	Kota Tarakan	58,86	87,76	82,48	76,31	190	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
SULAWESI UTARA							
371	Bolaang Mongondow	71,92	90,41	69,97	77,37	164	6
372	Minahasa	80,98	85,58	72,12	79,53	108	6
373	Kepulauan Sangihe	43,13	82,79	64,81	63,48	429	4
374	Kepulauan Talaud	52,40	86,40	71,82	70,13	346	5
375	Minahasa Selatan	61,21	85,75	67,27	71,34	321	5
376	Minahasa Utara	78,77	87,03	76,51	80,74	70	6
377	Minahasa Tenggara	66,64	81,48	70,97	72,99	272	5
378	Bolaang Mongondow Utara	78,20	83,69	64,43	75,40	217	5
379	Kep. Siau Tagulandang Biaro	27,19	81,14	58,24	55,39	479	3
380	Bolaang Mongondow Timur	74,51	89,21	68,29	77,28	167	5
381	Bolaang Mongondow Selatan	81,99	80,64	70,85	77,81	145	6
382	Kota Manado	49,43	87,54	80,29	72,35	290	5
383	Kota Bitung	47,76	86,53	75,48	69,84	351	5
384	Kota Tomohon	82,44	87,51	74,90	81,59	58	6
385	Kota Kotamobagu	85,80	85,83	76,77	82,78	38	6
SULAWESI TENGAH							
386	Banggai	65,57	87,72	70,35	74,48	238	5
387	Poso	59,86	82,06	73,93	71,90	300	5
388	Donggala	61,91	75,42	66,51	67,91	394	4
389	Toli-Toli	59,86	77,99	71,41	69,71	354	5
390	Buol	57,82	84,36	72,52	71,50	312	5
391	Morowali	60,26	86,05	69,36	71,82	304	5
392	Banggai Kepulauan	53,25	79,25	66,73	66,34	407	4
393	Parigi Moutong	66,22	79,28	69,03	71,47	313	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
394 Tojo Una Una	58,60	77,45	69,18	68,36	385	4
395 Sigi	56,98	82,05	65,76	68,19	390	4
396 Banggai Laut	29,02	80,92	63,22	57,61	471	3
397 Morowali Utara	60,82	89,22	76,92	75,59	209	5
398 Kota Palu	50,30	87,97	73,55	70,52	340	5
SULAWESI SELATAN						
399 Kepulauan Selayar	73,45	84,20	68,60	75,37	218	5
400 Bulukumba	93,09	93,49	71,73	86,07	13	6
401 Bantaeng	83,26	92,77	76,73	84,21	25	6
402 Jeneponto	77,22	84,00	68,52	76,54	182	5
403 Takalar	60,77	85,66	69,48	71,90	299	5
404 Gowa	71,79	89,38	78,83	79,95	90	6
405 Sinjai	76,17	89,61	67,94	77,85	144	6
406 Bone	55,61	86,40	63,54	68,43	381	4
407 Maros	70,22	86,27	68,84	75,05	226	5
408 Pangkajene dan Kepulauan	80,70	84,21	74,60	79,82	97	6
409 Barru	66,84	86,50	67,77	73,64	256	5
410 Soppeng	83,18	84,06	66,78	77,97	142	6
411 Wajo	82,62	88,45	64,83	78,58	133	6
412 Sidenreng Rappang	61,93	90,90	72,89	75,16	224	5
413 Pinrang	64,74	83,56	69,87	72,67	279	5
414 Enrekang	59,84	83,34	68,53	70,51	341	5
415 Luwu	70,13	85,20	69,08	74,75	232	5
416 Tana Toraja	53,04	86,21	63,32	67,43	397	4
417 Luwu Utara	78,75	85,89	72,77	79,10	123	6

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
418	Luwu Timur	78,46	91,84	73,16	81,10	64	6
419	Toraja Utara	58,37	86,36	60,38	68,28	388	4
420	Kota Makassar	54,93	88,86	83,08	75,56	211	5
421	Kota Parepare	77,70	87,09	82,51	82,41	42	6
422	Kota Palopo	67,61	89,73	75,75	77,64	154	6
SULAWESI TENGGARA							
423	Kolaka	66,87	87,57	74,46	76,25	192	5
424	Konawe	83,22	83,81	72,25	79,74	100	6
425	Muna	46,35	76,22	59,23	60,52	454	3
426	Buton	60,00	83,40	65,39	69,53	355	5
427	Konawe Selatan	59,93	80,10	65,33	68,39	383	4
428	Bombana	63,04	86,31	68,55	72,56	282	5
429	Wakatobi	60,53	78,64	66,03	68,35	387	4
430	Kolaka Utara	49,99	86,62	70,93	69,09	371	4
431	Konawe Utara	64,06	86,29	70,45	73,54	259	5
432	Buton Utara	66,43	76,85	70,98	71,39	318	5
433	Kolaka Timur	86,02	86,29	78,48	83,58	30	6
434	Konawe Kepulauan	35,97	83,97	60,62	60,07	456	3
435	Muna Barat	51,59	80,46	62,37	64,73	421	4
436	Buton Tengah	49,28	84,80	68,43	67,42	398	4
437	Buton Selatan	54,03	81,71	53,93	63,13	433	4
438	Kota Kendari	37,15	92,00	85,06	71,30	323	5
439	Kota Bau Bau	77,00	88,05	71,70	78,87	128	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
GORONTALO							
440	Gorontalo	61,12	79,15	66,31	68,81	375	4
441	Boalemo	66,22	73,57	74,64	71,47	314	5
442	Bone Bolango	60,72	78,94	68,46	69,32	361	4
443	Pohuwato	65,07	77,14	69,23	70,45	342	5
444	Gorontalo Utara	70,03	76,37	63,97	70,09	348	5
445	Kota Gorontalo	63,93	89,29	73,38	75,47	213	5
SULAWESI BARAT							
446	Pasangkayu	64,17	90,32	62,99	72,41	288	5
447	Mamuju	80,89	85,99	59,96	75,56	210	5
448	Mamasa	53,77	69,57	50,93	58,03	468	3
449	Polewali Mandar	64,14	84,35	62,03	70,10	347	5
450	Majene	66,82	81,73	65,17	71,19	326	5
451	Mamuju Tengah	62,18	86,54	59,93	69,47	356	4
MALUKU							
452	Maluku Tengah	62,01	73,98	70,17	68,69	377	4
453	Maluku Tenggara	40,97	71,57	65,52	59,29	458	3
454	Kepulauan Tanimbar	21,61	64,12	61,08	48,86	492	2
455	Buru	57,61	70,42	59,99	62,64	440	4
456	Seram Bagian Timur	49,24	67,48	59,29	58,62	463	3
457	Seram Bagian Barat	41,15	66,35	59,24	55,53	477	3
458	Kepulauan Aru	23,08	68,82	52,91	48,17	493	2
459	Maluku Barat Daya	48,40	67,93	64,08	60,10	455	3
460	Buru Selatan	32,98	72,81	58,41	54,64	482	3
461	Kota Ambon	33,33	82,45	81,63	65,72	415	4
462	Kota Tual	26,58	66,04	64,05	52,16	487	2

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
MALUKU UTARA							
463	Halmahera Barat	33,71	77,62	55,87	55,62	476	3
464	Halmahera Tengah	43,72	72,29	59,85	58,55	466	3
465	Halmahera Utara	45,08	82,67	60,84	62,77	439	4
466	Halmahera Selatan	46,67	84,29	54,55	61,72	445	4
467	Kepulauan Sula	32,24	62,97	51,83	48,94	491	2
468	Halmahera Timur	78,41	81,36	60,07	73,24	268	5
469	Pulau Morotai	51,64	82,47	63,50	65,78	414	4
470	Pulau Taliabu	42,72	75,84	50,39	56,22	475	3
471	Kota Ternate	30,93	88,76	73,27	64,19	425	4
472	Kota Tidore Kepulauan	25,34	83,26	62,93	57,05	473	3
PAPUA							
473	Jayapura	44,62	78,52	69,75	64,23	424	4
474	Kepulauan Yapen	55,14	60,65	63,55	59,78	457	3
475	Biak Numfor	23,85	65,71	64,63	51,33	488	2
476	Sarmi	48,18	73,73	60,94	60,89	452	3
477	Keerom	38,04	67,04	57,51	54,13	484	3
478	Waropen	19,74	59,50	55,96	45,00	497	1
479	Supiori	28,69	55,96	56,03	46,85	496	2
480	Mamberamo Raya	20,54	51,24	43,03	38,20	503	1
481	Kota Jayapura	29,21	83,60	72,71	61,73	444	4
PAPUA BARAT							
482	Manokwari	48,00	74,63	66,25	62,90	437	4
483	Fak Fak	24,05	77,28	49,93	50,29	490	2
484	Teluk Bintuni	53,33	74,86	55,14	61,04	450	3

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
485 Teluk Wondama	55,34	70,62	50,08	58,62	464	3
486 Kaimana	52,11	80,87	58,38	63,70	427	4
487 Manokwari Selatan	50,32	73,28	52,38	58,59	465	3
488 Pegunungan Arfak	11,69	64,33	34,63	36,75	505	1
PAPUA SELATAN						
489 Merauke	68,46	66,22	73,29	69,34	360	4
490 Boven Digoel	25,16	67,53	52,01	48,14	494	2
491 Mappi	28,95	56,81	40,50	42,01	499	1
492 Asmat	44,30	64,99	44,86	51,31	489	2
PAPUA TENGAH						
493 Nabire	48,47	75,24	66,28	63,27	431	4
494 Puncak Jaya	15,80	58,46	39,65	37,87	504	1
495 Paniai	24,55	52,61	30,63	35,84	506	1
496 Mimika	59,53	81,51	63,59	68,14	391	4
497 Puncak	8,52	38,74	14,29	20,43	514	1
498 Dogiyai	20,29	48,21	25,24	31,16	511	1
499 Intan Jaya	21,52	51,65	26,46	33,12	509	1
500 Deiyai	20,93	54,02	26,57	33,74	508	1
PAPUA PEGUNUNGAN						
501 Jayawijaya	20,49	70,29	39,02	43,13	498	1
502 Pegunungan Bintang	18,14	74,84	24,38	38,94	501	1
503 Yahukimo	19,88	56,48	29,86	35,30	507	1
504 Tolikara	17,55	63,06	15,12	31,76	510	1
505 Mamberamo Tengah	14,71	53,54	20,21	29,36	512	1
506 Yalimo	20,29	65,85	37,52	41,10	500	1

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
507 Lanny Jaya	25,09	60,84	29,71	38,44	502	1
508 Nduga	13,41	52,10	18,30	27,82	513	1
PAPUA BARAT DAYA						
509 Sorong	37,29	65,55	56,61	53,09	485	2
510 Sorong Selatan	36,15	77,46	51,28	54,85	481	3
511 Raja Ampat	41,86	78,17	55,49	58,41	467	3
512 Tambrauw	26,10	70,21	44,85	46,94	495	2
513 Maybrat	39,32	70,85	59,73	56,56	474	3
514 Kota Sorong	33,23	81,81	70,12	61,62	446	4

Keterangan:

- Jumlah Kabupaten dan Kota adalah 514
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik

1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Tabel 15. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2025

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
ACEH							
1	Aceh Selatan	80,58	84,59	66,67	77,25	109	5
2	Aceh Tenggara	62,04	83,00	62,67	69,16	329	4
3	Aceh Timur	58,07	83,11	54,60	65,17	395	4
4	Aceh Tengah	72,34	83,83	67,80	74,61	187	5
5	Aceh Barat	72,52	75,09	74,04	73,88	205	5
6	Aceh Besar	61,95	84,33	74,52	73,55	214	5
7	Pidie	53,80	81,87	54,66	63,35	417	4
8	Aceh Utara	54,50	79,15	61,77	65,07	396	4
9	Simeulue	53,62	71,59	61,29	62,12	425	4
10	Aceh Singkil	36,50	72,52	60,47	56,42	460	3
11	Bireuen	73,72	84,69	70,36	76,22	137	5
12	Aceh Barat Daya	62,01	80,88	64,03	68,91	336	4
13	Gayo Lues	70,96	78,71	66,57	72,05	257	5
14	Aceh Jaya	91,23	87,87	64,28	81,09	43	6
15	Nagan Raya	73,40	77,99	71,74	74,36	195	5
16	Aceh Tamiang	79,15	81,75	73,76	78,20	89	6
17	Bener Meriah	69,14	81,25	59,41	69,88	307	5
18	Pidie Jaya	60,84	77,07	59,79	65,84	389	4
19	Kota Banda Aceh	59,67	83,08	85,64	76,10	147	5
20	Kota Sabang	36,70	82,60	75,02	64,68	403	4
21	Kota Lhokseumawe	51,50	80,98	73,08	68,46	352	4
22	Kota Langsa	49,68	84,35	73,51	69,11	331	4
23	Kota Subulussalam	28,60	82,19	53,46	54,61	472	3

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
SUMATERA UTARA							
24	Tapanuli Tengah	57,27	84,75	57,52	66,42	380	4
25	Tapanuli Utara	78,46	87,24	57,98	74,50	191	5
26	Tapanuli Selatan	59,34	86,25	61,34	68,89	338	4
27	Nias	54,70	83,55	53,42	63,79	410	4
28	Langkat	54,95	84,83	73,62	71,06	285	5
29	Karo	92,87	87,70	65,78	82,09	34	6
30	Deli Serdang	61,92	88,03	80,95	76,91	120	5
31	Simalungun	58,76	80,20	71,96	70,26	301	5
32	Asahan	62,21	80,47	69,46	70,66	295	5
33	Labuhanbatu	63,00	86,08	64,84	71,23	279	5
34	Dairi	60,20	90,54	63,33	71,26	277	5
35	Toba	71,08	90,36	70,73	77,33	107	5
36	Mandailing Natal	61,97	86,38	57,69	68,59	345	4
37	Nias Selatan	55,81	80,93	48,58	61,68	432	4
38	Pakpak Bharat	60,56	89,76	61,06	70,36	299	5
39	Humbang Hasundutan	77,44	87,58	72,22	79,04	69	6
40	Samosir	73,57	87,37	68,19	76,32	135	5
41	Serdang Bedagai	59,55	87,71	70,02	72,35	244	5
42	Batu Bara	53,66	84,25	70,24	69,31	326	4
43	Padang Lawas Utara	59,66	87,34	60,26	68,99	334	4
44	Padang Lawas	56,15	88,16	62,67	68,90	337	4
45	Labuhanbatu Selatan	37,79	88,19	75,27	66,98	371	4
46	Labuhanbatu Utara	66,03	84,62	79,67	76,73	126	5
47	Nias Utara	52,96	77,38	53,02	61,04	436	3

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
48	Nias Barat	48,65	76,34	39,18	54,61	471	3
49	Kota Medan	40,84	78,20	90,63	69,85	309	5
50	Kota Pematangsiantar	55,01	87,87	74,13	72,26	247	5
51	Kota Sibolga	36,83	86,39	76,81	66,58	377	4
52	Kota Tanjungbalai	40,37	81,28	78,88	66,77	374	4
53	Kota Binjai	50,03	87,20	82,73	73,25	221	5
54	Kota Tebing Tinggi	58,88	86,44	83,45	76,21	138	5
55	Kota Padangsidimpuan	69,77	88,77	67,51	75,28	168	5
56	Kota Gunungsitoli	48,31	80,36	62,65	63,69	412	4
SUMATERA BARAT							
57	Pesisir Selatan	71,28	87,46	78,98	79,20	64	6
58	Solok	60,19	84,91	73,19	72,70	240	5
59	Sijunjung	68,48	87,85	71,89	76,02	152	5
60	Tanah Datar	69,51	88,92	76,08	78,12	92	6
61	Padang Pariaman	51,64	84,99	71,02	69,14	330	4
62	Agam	59,84	80,68	74,40	71,60	266	5
63	Lima Puluh Kota	87,51	87,20	72,45	82,37	27	6
64	Pasaman	81,39	86,52	71,16	79,65	56	6
65	Kepulauan Mentawai	65,78	79,67	56,83	67,36	365	4
66	Dharmasraya	69,22	87,76	79,15	78,67	80	6
67	Solok Selatan	71,59	85,06	80,18	78,91	72	6
68	Pasaman Barat	79,16	82,24	74,67	78,67	79	6
69	Kota Padang	74,02	89,70	84,09	82,57	26	6
70	Kota Solok	81,18	89,23	87,40	85,92	5	6
71	Kota Sawahlunto	62,69	89,22	84,66	78,81	75	6

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
72	Kota Padang Panjang	77,56	83,18	83,68	81,46	40	6
73	Kota Bukittinggi	51,85	84,81	85,82	74,10	203	5
74	Kota Payakumbuh	84,28	89,21	86,76	86,74	2	6
75	Kota Pariaman	63,62	87,26	84,46	78,40	86	6
RIAU							
76	Kampar	63,54	84,18	69,17	72,24	248	5
77	Indragiri Hulu	38,31	85,51	77,31	66,95	372	4
78	Bengkalis	73,77	86,84	78,99	79,83	53	6
79	Indragiri Hilir	56,46	83,85	57,37	65,81	390	4
80	Pelalawan	59,41	85,68	77,96	74,29	198	5
81	Rokan Hulu	38,56	83,88	76,42	66,20	385	4
82	Rokan Hilir	53,04	87,61	61,07	67,14	367	4
83	Siak	60,96	83,22	82,16	75,41	164	5
84	Kuantan Singingi	56,57	87,17	74,98	72,84	236	5
85	Kepulauan Meranti	59,91	75,04	50,97	61,91	428	4
86	Kota Pekanbaru	48,16	86,36	75,05	69,77	312	5
87	Kota Dumai	52,57	85,64	72,55	70,17	304	5
JAMBI							
88	Kerinci	63,96	76,41	69,42	69,90	306	5
89	Merangin	73,99	85,64	64,62	74,69	185	5
90	Sarolangun	69,06	87,13	69,36	75,12	173	5
91	Batanghari	70,14	85,64	75,23	76,96	117	5
92	Muaro Jambi	77,07	89,58	71,40	79,30	62	6
93	Tanjung Jabung Barat	78,45	79,42	67,30	75,04	176	5
94	Tanjung Jabung Timur	84,90	80,57	70,70	78,71	77	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
95	Bungo	78,11	85,86	71,69	78,52	84	6
96	Tebo	65,28	84,22	66,96	72,09	253	5
97	Kota Jambi	58,00	82,84	90,05	76,94	119	5
98	Kota Sungai Penuh	81,26	80,78	87,50	83,19	22	6
SUMATERA SELATAN							
99	Ogan Komering Ulu	72,38	80,57	66,88	73,24	223	5
100	Ogan Komering Ilir	86,75	76,83	77,51	80,38	47	6
101	Muara Enim	83,55	85,74	79,10	82,78	24	6
102	Lahat	73,58	81,72	73,27	76,16	142	5
103	Musi Rawas	88,93	84,29	73,79	82,33	28	6
104	Musi Banyuasin	81,96	81,91	72,43	78,75	76	6
105	Banyuasin	96,60	82,03	73,19	83,95	14	6
106	Ogan Komering Ulu Timur	81,64	80,92	82,71	81,76	38	6
107	Ogan Komering Ulu Selatan	74,63	80,28	73,72	76,19	139	5
108	Ogan Ilir	63,93	81,11	74,88	73,27	220	5
109	Empat Lawang	81,32	79,63	55,40	72,08	254	5
110	Penukal Abab Lematang Ilir	80,27	83,69	76,18	80,03	51	6
111	Musi Rawas Utara	71,90	78,97	67,99	72,92	233	5
112	Kota Palembang	65,21	85,38	91,16	80,56	45	6
113	Kota Pagar Alam	87,87	87,05	75,89	83,59	19	6
114	Kota Lubuk Linggau	73,38	85,07	79,41	79,26	63	6
115	Kota Prabumulih	55,48	84,70	80,69	73,57	213	5
BENGKULU							
116	Bengkulu Selatan	87,36	76,72	60,13	74,73	184	5
117	Rejang Lebong	77,32	78,70	58,14	71,35	275	5

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
118	Bengkulu Utara	53,65	85,01	62,42	66,94	373	4
119	Kaur	57,28	78,11	62,71	65,97	387	4
120	Seluma	76,51	79,63	59,91	71,98	259	5
121	Mukomuko	71,72	82,47	74,21	76,10	146	5
122	Lebong	79,63	82,12	62,75	74,80	181	5
123	Kepahiang	59,98	81,14	68,17	69,71	318	5
124	Bengkulu Tengah	74,44	83,96	60,31	72,85	235	5
125	Kota Bengkulu	33,14	80,81	77,68	63,79	409	4
LAMPUNG							
126	Lampung Selatan	79,52	82,86	84,33	82,23	30	6
127	Lampung Tengah	63,74	83,95	68,78	72,10	252	5
128	Lampung Utara	69,40	76,94	58,41	68,21	356	4
129	Lampung Barat	77,71	83,20	70,64	77,15	111	5
130	Tulang Bawang	67,32	84,31	68,92	73,46	217	5
131	Tanggamus	63,43	81,76	58,34	67,77	361	4
132	Lampung Timur	54,28	78,09	66,98	66,39	381	4
133	Way Kanan	80,70	79,18	76,57	78,82	74	6
134	Pesawaran	68,42	81,18	68,40	72,62	241	5
135	Pringsewu	76,66	81,69	69,91	76,06	148	5
136	Mesuji	79,20	88,94	70,13	79,38	60	6
137	Tulang Bawang Barat	57,28	85,84	62,13	68,33	353	4
138	Pesisir Barat	81,50	81,99	59,87	74,41	194	5
139	Kota Bandar Lampung	45,21	83,30	86,00	71,44	272	5
140	Kota Metro	77,91	84,85	88,26	83,67	18	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
KEP. BANGKA BELITUNG							
141	Bangka	84,14	86,51	81,12	83,91	15	6
142	Belitung	62,01	81,69	82,36	75,33	167	5
143	Bangka Selatan	71,02	87,79	68,58	75,74	156	5
144	Bangka Tengah	63,30	84,76	78,95	75,62	159	5
145	Bangka Barat	74,24	87,36	69,39	76,94	118	5
146	Belitung Timur	67,07	82,66	78,69	76,11	145	5
147	Kota Pangkal Pinang	62,81	87,42	87,11	79,07	68	6
KEP. RIAU							
148	Bintan	61,72	89,81	68,17	73,15	228	5
149	Karimun	40,90	81,50	67,89	63,34	418	4
150	Natuna	45,55	88,41	80,84	71,52	267	5
151	Lingga	50,12	79,56	74,58	68,03	359	4
152	Kepulauan Anambas	45,39	90,65	63,30	66,33	383	4
153	Kota Batam	49,99	87,06	86,78	74,55	189	5
154	Kota Tanjung Pinang	43,44	90,11	76,03	69,76	314	5
DKI JAKARTA							
155	Adm. Kepulauan Seribu	33,43	87,24	70,87	63,73	411	4
156	Kota Adm. Jakarta Pusat	39,10	90,37	83,05	70,74	292	5
157	Kota Adm. Jakarta Utara	42,88	82,56	79,04	68,09	358	4
158	Kota Adm. Jakarta Barat	37,13	89,85	87,06	71,25	278	5
159	Kota Adm. Jakarta Selatan	41,53	89,89	88,01	73,06	231	5
160	Kota Adm. Jakarta Timur	39,95	90,11	89,11	72,97	232	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
JAWA BARAT							
161	Bogor	73,84	85,85	69,54	76,36	133	5
162	Sukabumi	79,40	87,26	69,50	78,68	78	6
163	Cianjur	69,25	86,87	79,74	78,58	81	6
164	Bandung	73,40	82,62	74,00	76,64	127	5
165	Garut	78,72	83,87	74,77	79,10	66	6
166	Tasikmalaya	60,28	82,52	70,78	71,14	282	5
167	Ciamis	61,93	87,17	66,13	71,67	265	5
168	Kuningan	52,53	84,54	67,11	67,98	360	4
169	Cirebon	66,74	83,29	69,63	73,17	226	5
170	Majalengka	58,49	78,93	78,08	71,80	261	5
171	Sumedang	74,09	84,51	79,03	79,18	65	6
172	Indramayu	72,98	80,15	75,49	76,19	141	5
173	Subang	64,53	81,92	77,19	74,51	190	5
174	Purwakarta	63,67	83,08	76,70	74,44	192	5
175	Karawang	66,66	84,56	79,13	76,74	125	5
176	Bekasi	72,17	76,91	82,34	77,14	112	5
177	Bandung Barat	55,50	81,37	71,82	69,50	323	4
178	Pangandaran	72,60	85,59	77,65	78,58	82	6
179	Kota Bogor	27,40	83,22	77,72	62,68	423	4
180	Kota Sukabumi	70,41	86,87	79,57	78,91	73	6
181	Kota Bandung	54,57	84,72	84,14	74,43	193	5
182	Kota Cirebon	38,69	81,88	77,04	65,79	391	4
183	Kota Bekasi	43,96	86,33	89,12	73,07	230	5
184	Kota Depok	41,48	85,42	85,21	70,63	297	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
185	Kota Cimahi	55,41	84,39	84,19	74,62	186	5
186	Kota Tasikmalaya	78,88	84,07	71,43	78,10	93	6
187	Kota Banjar	89,54	82,70	79,82	84,03	13	6
JAWA TENGAH							
188	Cilacap	50,75	78,55	76,52	68,55	347	4
189	Banyumas	54,47	77,69	80,52	70,86	288	5
190	Purbalingga	72,64	77,21	75,74	75,19	170	5
191	Banjarnegara	59,02	77,06	77,85	71,28	276	5
192	Kebumen	60,22	77,65	78,41	72,06	256	5
193	Purworejo	50,31	79,66	80,90	70,24	302	5
194	Wonosobo	57,09	73,64	77,62	69,43	324	4
195	Magelang	63,47	81,62	75,25	73,41	218	5
196	Boyolali	52,95	82,74	76,51	70,67	294	5
197	Klaten	56,51	79,68	79,86	71,98	258	5
198	Sukoharjo	52,86	85,43	84,23	74,12	202	5
199	Wonogiri	69,34	78,68	80,09	76,02	151	5
200	Karanganyar	62,17	82,02	82,27	75,45	161	5
201	Sragen	57,53	83,01	85,67	75,36	165	5
202	Grobogan	65,04	80,76	80,54	75,42	163	5
203	Blora	63,22	77,38	80,84	73,79	209	5
204	Rembang	64,88	77,75	83,81	75,47	160	5
205	Pati	72,84	84,94	81,31	79,67	55	6
206	Kudus	59,59	85,84	76,15	73,80	208	5
207	Jepara	78,70	87,82	78,26	81,56	39	6
208	Demak	60,17	81,55	87,62	76,42	131	5

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
209	Semarang	54,44	86,43	82,08	74,26	200	5
210	Temanggung	46,94	81,72	77,04	68,50	351	4
211	Kendal	68,09	80,85	82,88	77,26	108	5
212	Batang	87,64	83,24	80,20	83,69	17	6
213	Pekalongan	61,12	84,47	79,53	74,99	177	5
214	Pemalang	61,97	80,59	70,88	71,10	284	5
215	Tegal	51,60	84,76	77,18	71,11	283	5
216	Brebes	69,14	78,97	77,38	75,14	172	5
217	Kota Magelang	45,18	85,52	85,03	71,84	260	5
218	Kota Surakarta	38,81	79,07	87,91	68,54	349	4
219	Kota Salatiga	62,03	86,82	89,27	79,33	61	6
220	Kota Semarang	43,29	88,56	91,22	74,28	199	5
221	Kota Pekalongan	54,11	83,91	72,79	70,20	303	5
222	Kota Tegal	34,39	88,06	87,43	69,87	308	5
DI YOGYAKARTA							
223	Kulon Progo	60,40	76,67	79,94	72,31	245	5
224	Bantul	66,18	79,46	84,85	76,82	123	5
225	Gunungkidul	62,75	78,18	73,57	71,47	269	5
226	Sleman	86,94	82,82	86,68	85,50	7	6
227	Kota Yogyakarta	45,65	86,18	84,70	72,11	251	5
JAWA TIMUR							
228	Pacitan	58,32	79,11	78,89	72,07	255	5
229	Ponorogo	49,24	84,85	79,77	71,22	280	5
230	Trenggalek	75,45	78,01	77,02	76,82	122	5
231	Tulungagung	62,69	82,56	79,31	74,82	180	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
232	Blitar	49,78	82,15	77,38	69,71	319	5
233	Kediri	48,49	83,11	81,98	71,14	281	5
234	Malang	58,76	77,55	73,09	69,76	313	5
235	Lumajang	62,38	83,49	74,03	73,25	222	5
236	Jember	54,52	81,80	69,45	68,52	350	4
237	Banyuwangi	63,76	87,42	81,82	77,62	103	6
238	Bondowoso	56,17	79,78	76,32	70,71	293	5
239	Situbondo	58,01	80,64	76,50	71,67	263	5
240	Probolinggo	60,37	78,23	66,03	68,16	357	4
241	Pasuruan	55,16	85,39	72,19	70,84	289	5
242	Sidoarjo	53,96	90,81	86,80	77,12	113	5
243	Mojokerto	76,95	85,61	83,89	82,14	32	6
244	Jombang	78,09	83,48	81,25	80,93	44	6
245	Nganjuk	59,28	82,60	79,22	73,66	211	5
246	Madiun	61,02	82,92	81,89	75,24	169	5
247	Magetan	69,12	81,51	84,33	78,30	87	6
248	Ngawi	64,74	81,01	84,02	76,57	128	5
249	Bojonegoro	52,33	82,93	81,62	72,24	249	5
250	Tuban	56,09	79,37	84,33	73,23	224	5
251	Lamongan	61,04	83,42	86,81	77,06	114	5
252	Gresik	63,50	86,52	85,48	78,46	85	6
253	Bangkalan	51,69	76,24	58,14	61,95	426	4
254	Sampang	54,82	75,35	60,16	63,38	415	4
255	Pamekasan	45,00	82,23	63,64	63,53	414	4
256	Sumenep	71,10	75,77	73,68	73,50	215	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
257	Kota Kediri	41,60	87,43	82,46	70,41	298	5
258	Kota Blitar	38,81	86,24	83,89	69,56	322	5
259	Kota Malang	26,05	89,50	85,00	66,73	375	4
260	Kota Probolinggo	46,69	87,91	71,41	68,57	346	4
261	Kota Pasuruan	48,22	89,74	76,70	71,46	270	5
262	Kota Mojokerto	35,72	90,28	80,57	68,75	343	4
263	Kota Madiun	52,15	88,34	92,61	77,65	100	6
264	Kota Surabaya	37,43	86,62	95,99	73,28	219	5
265	Kota Batu	48,52	91,08	79,91	73,08	229	5
BANTEN							
266	Pandeglang	57,59	82,25	56,14	65,24	394	4
267	Lebak	76,85	86,02	62,77	75,16	171	5
268	Tangerang	74,04	85,52	78,70	79,39	58	6
269	Serang	80,06	90,89	75,54	82,12	33	6
270	Kota Tangerang	66,70	87,23	90,44	81,43	41	6
271	Kota Cilegon	59,80	87,97	80,87	76,15	143	5
272	Kota Serang	76,62	84,03	74,99	78,52	83	6
273	Kota Tangerang Selatan	62,71	87,52	84,63	78,24	88	6
BALI							
274	Jembrana	62,39	87,54	84,34	78,04	94	6
275	Tabanan	69,99	90,60	72,98	77,79	98	6
276	Badung	89,61	89,48	87,27	88,79	1	6
277	Gianyar	67,24	93,91	88,93	83,31	21	6
278	Klungkung	58,10	87,32	76,15	73,79	210	5
279	Bangli	62,91	93,31	66,59	74,17	201	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
280	Karangasem	76,01	86,17	65,15	75,72	157	5
281	Buleleng	63,12	86,02	78,31	75,76	155	5
282	Kota Denpasar	67,12	93,68	90,72	83,79	16	6
NUSA TENGGARA BARAT							
283	Lombok Barat	62,84	81,02	76,74	73,50	216	5
284	Lombok Tengah	74,43	81,18	69,68	75,07	175	5
285	Lombok Timur	73,91	77,40	59,87	70,36	300	5
286	Sumbawa	65,09	80,30	78,48	74,59	188	5
287	Dompu	70,37	86,03	76,24	77,50	105	6
288	Bima	90,35	79,56	64,07	77,98	96	6
289	Sumbawa Barat	84,03	81,47	75,70	80,40	46	6
290	Lombok Utara	95,84	73,36	61,65	76,97	116	5
291	Kota Mataram	69,39	86,49	78,73	78,16	90	6
292	Kota Bima	89,50	85,96	70,46	81,96	36	6
NUSA TENGGARA TIMUR							
293	Kupang	46,11	71,62	60,98	59,51	444	3
294	Timor Tengah Selatan	42,12	70,49	57,02	56,47	458	3
295	Timor Tengah Utara	47,97	73,65	54,30	58,57	448	3
296	Belu	45,30	75,27	49,28	56,52	457	3
297	Alor	46,16	78,02	43,25	55,70	465	3
298	Flores Timur	46,86	74,92	56,15	59,23	445	3
299	Sikka	49,85	75,11	60,63	61,80	430	4
300	Ende	45,97	74,79	68,58	63,06	420	4
301	Ngada	56,46	76,50	61,35	64,71	402	4
302	Manggarai	54,52	75,21	55,08	61,54	433	4

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
303	Sumba Timur	51,77	68,09	51,12	56,94	456	3
304	Sumba Barat	43,88	71,80	49,83	55,09	468	3
305	Lembata	39,91	69,88	53,20	54,25	474	3
306	Rote Ndao	40,19	63,62	62,34	55,34	466	3
307	Manggarai Barat	51,30	75,43	56,14	60,88	437	3
308	Nagekeo	42,18	73,97	57,31	57,74	453	3
309	Sumba Tengah	50,01	63,29	46,99	53,38	476	2
310	Sumba Barat Daya	43,75	68,65	35,55	49,22	486	2
311	Manggarai Timur	49,24	71,67	58,12	59,62	442	3
312	Sabu Raijua	44,50	69,53	40,55	51,43	480	2
313	Malaka	52,07	78,36	48,53	59,56	443	3
314	Kota Kupang	25,59	79,79	74,60	59,89	439	3
KALIMANTAN BARAT							
315	Sambas	61,14	86,66	52,21	66,57	378	4
316	Mempawah	81,23	82,41	59,41	74,31	197	5
317	Sanggau	74,34	85,66	67,55	75,80	154	5
318	Ketapang	65,53	82,80	71,37	73,19	225	5
319	Sintang	74,38	75,56	59,26	69,70	320	5
320	Kapuas Hulu	50,21	86,37	68,53	68,28	355	4
321	Bengkayang	68,66	87,54	69,32	75,11	174	5
322	Landak	63,62	82,65	63,76	69,95	305	5
323	Sekadau	78,77	83,51	66,39	76,19	140	5
324	Melawi	63,77	80,63	62,16	68,79	342	4
325	Kayong Utara	83,62	84,84	61,30	76,55	129	5
326	Kubu Raya	60,70	83,74	55,28	66,49	379	4

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
327 Kota Pontianak	61,87	87,64	70,19	73,16	227	5
328 Kota Singkawang	79,44	86,40	66,70	77,47	106	6
KALIMANTAN TENGAH						
329 Kotawaringin Barat	56,71	84,96	76,27	72,58	242	5
330 Kotawaringin Timur	82,00	89,39	72,77	81,35	42	6
331 Kapuas	74,54	87,06	63,08	74,83	179	5
332 Barito Selatan	55,40	88,11	63,86	69,03	333	4
333 Barito Utara	53,60	87,50	77,33	72,73	238	5
334 Katingan	81,99	87,58	59,97	76,46	130	5
335 Seruyan	49,46	82,46	62,49	64,72	401	4
336 Sukamara	50,70	86,63	70,51	69,19	328	4
337 Lamandau	53,68	90,65	72,82	72,29	246	5
338 Gunung Mas	57,83	85,28	65,38	69,42	325	4
339 Pulang Pisau	74,30	82,81	61,17	72,71	239	5
340 Murung Raya	36,89	87,12	59,63	61,09	435	3
341 Barito Timur	66,87	87,36	67,96	74,00	204	5
342 Kota Palangkaraya	57,51	89,55	81,30	76,05	149	5
KALIMANTAN SELATAN						
343 Tanah Laut	88,07	85,81	65,90	79,90	52	6
344 Kotabaru	86,30	85,75	74,64	82,21	31	6
345 Banjar	93,65	88,91	71,61	84,70	9	6
346 Barito Kuala	87,21	88,95	77,18	84,42	11	6
347 Tapin	80,30	88,39	79,19	82,60	25	6
348 Hulu Sungai Selatan	95,97	84,17	73,52	84,56	10	6
349 Hulu Sungai Tengah	96,08	84,74	76,17	85,67	6	6

	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
350	Hulu Sungai Utara	82,13	83,35	73,79	79,74	54	6
351	Tabalong	91,33	84,83	79,51	85,23	8	6
352	Tanah Bumbu	89,59	90,41	69,65	83,18	23	6
353	Balangan	93,48	86,02	79,76	86,42	4	6
354	Kota Banjarmasin	64,44	83,74	82,28	76,78	124	5
355	Kota Banjarbaru	63,26	84,47	83,37	77,00	115	5
KALIMANTAN TIMUR							
356	Paser	84,88	85,98	79,54	83,46	20	6
357	Kutai Kartanegara	87,33	84,87	87,27	86,50	3	6
358	Berau	78,58	85,34	82,13	82,00	35	6
359	Kutai Barat	75,34	85,05	73,71	78,00	95	6
360	Kutai Timur	77,68	85,25	77,66	80,17	49	6
361	Penajam Paser Utara	80,68	86,84	79,24	82,23	29	6
362	Mahakam Ulu	58,74	76,24	64,08	66,31	384	4
363	Kota Balikpapan	64,23	89,23	83,48	78,93	71	6
364	Kota Samarinda	61,66	86,01	85,36	77,63	102	6
365	Kota Bontang	59,79	87,26	86,90	77,94	97	6
KALIMANTAN UTARA							
366	Bulungan	59,86	76,36	76,31	70,82	290	5
367	Malinau	57,54	84,42	64,78	68,84	339	4
368	Nunukan	69,99	82,61	75,58	76,03	150	5
369	Tana Tidung	38,18	85,16	71,46	64,83	398	4
370	Kota Tarakan	51,75	84,55	82,57	72,90	234	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
SULAWESI UTARA							
371	Bolaang Mongondow	87,12	83,77	66,43	79,08	67	6
372	Minahasa	64,96	85,19	71,47	73,81	207	5
373	Kepulauan Sangihe	44,22	83,57	64,73	64,08	407	4
374	Kepulauan Talaud	50,65	86,51	60,96	65,94	388	4
375	Minahasa Selatan	57,97	80,28	62,98	67,01	369	4
376	Minahasa Utara	80,26	86,80	71,86	79,60	57	6
377	Minahasa Tenggara	66,65	79,24	68,53	71,43	273	5
378	Bolaang Mongondow Utara	79,87	82,02	63,16	74,98	178	5
379	Kep. Siau Tagulandang Biaro	31,34	84,59	59,48	58,34	451	3
380	Bolaang Mongondow Timur	55,02	87,70	62,52	68,32	354	4
381	Bolaang Mongondow Selatan	78,19	79,67	63,84	73,87	206	5
382	Kota Manado	42,03	89,31	80,88	70,64	296	5
383	Kota Bitung	63,54	88,96	68,58	73,62	212	5
384	Kota Tomohon	79,85	84,91	75,57	80,08	50	6
385	Kota Kotamobagu	71,22	83,70	71,49	75,43	162	5
SULAWESI TENGAH							
386	Banggai	73,79	82,15	73,19	76,35	134	5
387	Poso	57,22	77,11	71,86	68,69	344	4
388	Donggala	63,66	60,02	62,12	61,94	427	4
389	Toli-Toli	55,84	72,93	69,55	66,07	386	4
390	Buol	60,47	76,50	66,08	67,64	363	4
391	Morowali	82,05	80,26	70,34	77,54	104	6
392	Banggai Kepulauan	67,81	75,36	66,11	69,73	316	5
393	Parigi Moutong	68,50	78,68	65,80	70,96	286	5

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
394	Tojo Una Una	57,72	73,25	76,80	69,24	327	4
395	Sigi	79,58	79,73	69,45	76,23	136	5
396	Banggai Laut	55,95	74,70	62,43	64,31	404	4
397	Morowali Utara	62,57	82,52	70,30	71,75	262	5
398	Kota Palu	50,97	86,10	72,37	69,73	315	5
SULAWESI SELATAN							
399	Kepulauan Selayar	63,60	80,99	70,01	71,49	268	5
400	Bulukumba	88,30	81,76	75,53	81,87	37	6
401	Bantaeng	88,27	86,90	77,41	84,18	12	6
402	Jeneponto	76,84	81,57	69,62	75,98	153	5
403	Takalar	68,36	83,90	60,73	70,93	287	5
404	Gowa	70,64	88,36	79,28	79,38	59	6
405	Sinjai	75,53	84,42	68,57	76,13	144	5
406	Bone	54,24	81,62	67,29	67,65	362	4
407	Maros	63,72	83,29	70,41	72,42	243	5
408	Pangkajene dan Kepulauan	76,70	81,84	78,33	78,94	70	6
409	Barru	70,80	84,47	63,30	72,80	237	5
410	Soppeng	75,72	84,14	74,66	78,14	91	6
411	Wajo	72,59	87,44	63,17	74,33	196	5
412	Sidenreng Rappang	66,22	89,05	71,97	75,68	158	5
413	Pinrang	63,67	86,73	73,99	74,74	183	5
414	Enrekang	61,73	78,34	65,73	68,55	348	4
415	Luwu	66,07	80,16	68,24	71,45	271	5
416	Tana Toraja	49,32	80,29	55,74	61,69	431	4
417	Luwu Utara	81,01	81,61	70,34	77,63	101	6

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
418	Luwu Timur	65,85	71,34	69,24	68,80	341	4
419	Toraja Utara	50,50	81,70	58,17	63,37	416	4
420	Kota Makassar	59,61	84,52	85,24	76,42	132	5
421	Kota Parepare	60,62	86,45	79,09	75,33	166	5
422	Kota Palopo	67,79	78,14	84,63	76,85	121	5
SULAWESI TENGGARA							
423	Kolaka	64,53	78,69	69,30	70,80	291	5
424	Konawe	82,41	80,21	70,40	77,66	99	6
425	Muna	41,71	71,57	50,17	54,40	473	3
426	Buton	55,67	77,24	64,39	65,71	392	4
427	Konawe Selatan	69,47	73,58	64,26	69,08	332	4
428	Bombana	66,46	81,47	67,23	71,67	264	5
429	Wakatobi	77,19	76,08	56,36	69,85	310	5
430	Kolaka Utara	49,91	81,94	69,32	66,98	370	4
431	Konawe Utara	58,11	84,23	64,39	68,84	340	4
432	Buton Utara	64,12	69,64	60,77	64,82	399	4
433	Kolaka Timur	84,55	83,63	72,77	80,30	48	6
434	Konawe Kepulauan	25,00	58,39	55,92	46,38	491	2
435	Muna Barat	48,00	74,00	53,29	58,35	450	3
436	Buton Tengah	38,25	75,46	54,60	56,01	464	3
437	Buton Selatan	57,38	77,92	56,35	63,81	408	4
438	Kota Kendari	37,70	84,87	86,73	69,69	321	5
439	Kota Bau Bau	44,95	82,48	65,46	64,21	406	4

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
GORONTALO						
440 Gorontalo	56,84	72,62	71,71	67,03	368	4
441 Boalemo	57,92	71,39	80,05	69,78	311	5
442 Bone Bolango	64,09	75,71	76,77	72,17	250	5
443 Pohuwato	78,37	70,99	74,83	74,75	182	5
444 Gorontalo Utara	65,99	72,10	61,77	66,59	376	4
445 Kota Gorontalo	52,63	82,43	79,28	71,39	274	5
SULAWESI BARAT						
446 Pasangkayu	39,34	83,28	59,62	60,63	438	3
447 Mamuju	81,44	83,32	67,05	77,24	110	5
448 Mamasa	48,04	86,11	45,37	59,71	441	3
449 Polewali Mandar	59,31	75,63	59,45	64,74	400	4
450 Majene	62,32	78,16	66,52	68,96	335	4
451 Mamuju Tengah	61,09	87,37	60,99	69,73	317	5
MALUKU						
452 Maluku Tengah	50,76	65,66	72,39	62,92	421	4
453 Maluku Tenggara	47,60	66,31	55,50	56,42	459	3
454 Kepulauan Tanimbar	17,10	61,41	48,97	42,40	499	1
455 Buru	49,34	72,57	55,19	58,97	447	3
456 Seram Bagian Timur	52,03	70,37	48,61	56,94	455	3
457 Seram Bagian Barat	39,12	64,85	64,81	56,22	463	3
458 Kepulauan Aru	24,23	64,79	46,77	45,16	496	1
459 Maluku Barat Daya	47,61	59,99	56,63	54,72	470	3
460 Buru Selatan	33,23	69,45	44,11	48,83	487	2
461 Kota Ambon	28,86	81,12	80,87	63,53	413	4
462 Kota Tual	28,55	64,52	58,87	50,58	482	2

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
MALUKU UTARA						
463 Halmahera Barat	20,59	78,23	60,87	53,10	477	2
464 Halmahera Tengah	38,68	76,27	58,25	57,64	454	3
465 Halmahera Utara	42,68	79,24	63,77	61,81	429	4
466 Halmahera Selatan	26,91	82,01	56,21	54,91	469	3
467 Kepulauan Sula	23,20	72,77	54,64	50,09	483	2
468 Halmahera Timur	63,88	76,14	62,04	67,31	366	4
469 Pulau Morotai	46,26	80,13	63,87	63,34	419	4
470 Pulau Taliabu	23,86	73,38	52,17	49,69	484	2
471 Kota Ternate	34,16	80,12	78,72	64,26	405	4
472 Kota Tidore Kepulauan	22,53	79,86	66,64	56,22	462	3
PAPUA						
473 Jayapura	53,92	74,86	65,87	64,83	397	4
474 Kepulauan Yapen	43,49	54,22	59,55	52,41	479	2
475 Biak Numfor	25,62	68,86	54,61	49,60	485	2
476 Sarmi	49,85	68,10	57,65	58,49	449	3
477 Keerom	43,52	68,99	56,65	56,32	461	3
478 Waropen	30,93	53,56	51,64	45,34	495	1
479 Supiori	36,36	52,76	49,38	46,13	494	2
480 Mamberamo Raya	45,31	50,67	44,99	46,97	489	2
481 Kota Jayapura	28,25	84,48	71,25	61,21	434	3
PAPUA BARAT						
482 Manokwari	66,35	73,40	62,63	67,43	364	4
483 Fak Fak	25,14	76,73	57,10	52,87	478	2
484 Teluk Bintuni	29,58	71,80	59,72	53,61	475	3

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
485 Teluk Wondama	48,76	53,80	50,65	51,06	481	2
486 Kaimana	60,37	75,03	63,87	66,38	382	4
487 Manokwari Selatan	51,83	66,40	61,42	59,85	440	3
488 Pegunungan Arfak	9,00	58,20	32,44	33,09	505	1
PAPUA SELATAN						
489 Merauke	64,32	63,60	68,72	65,56	393	4
490 Boven Digoel	23,46	58,72	57,53	46,51	490	2
491 Mappi	25,57	63,09	38,72	42,36	500	1
492 Asmat	42,25	56,04	40,36	46,17	493	2
PAPUA TENGAH						
493 Nabire	45,28	64,44	67,35	59,00	446	3
494 Puncak Jaya	23,24	60,31	36,73	39,99	501	1
495 Paniai	15,65	45,00	21,41	27,27	511	1
496 Mimika	52,11	71,67	65,01	62,88	422	4
497 Puncak	8,35	47,71	15,56	23,75	513	1
498 Dogiyai	20,85	53,70	34,70	36,33	503	1
499 Intan Jaya	15,27	50,86	16,23	27,34	510	1
500 Deiyai	18,94	43,06	25,10	28,96	508	1
PAPUA PEGUNUNGAN						
501 Jayawijaya	36,73	51,93	39,00	42,51	498	1
502 Pegunungan Bintang	21,59	45,13	33,30	33,28	504	1
503 Yahukimo	20,27	31,82	30,20	27,41	509	1
504 Tolikara	43,88	35,21	14,30	31,11	507	1
505 Mamberamo Tengah	14,84	35,81	28,68	26,40	512	1
506 Yalimo	21,46	51,79	39,23	37,42	502	1

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
507 Lanny Jaya	24,42	43,79	26,49	31,51	506	1
508 Nduga	10,29	31,15	18,52	19,93	514	1
PAPUA BARAT DAYA						
509 Sorong	39,46	68,25	58,14	55,22	467	3
510 Sorong Selatan	24,61	71,41	42,92	46,19	492	2
511 Raja Ampat	47,23	76,21	50,10	57,75	452	3
512 Tambrau	17,17	65,24	50,57	44,22	497	1
513 Maybrat	34,57	58,53	52,80	48,58	488	2
514 Kota Sorong	37,69	81,27	69,12	62,60	424	4

Keterangan:

- Jumlah Kabupaten dan Kota adalah 514
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik

1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Tabel 16. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2026

	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	Aceh	62,87	80,97	66,61	70,09	29	5
2	Sumatera Utara	59,98	88,14	71,35	73,08	21	5
3	Sumatera Barat	71,70	87,84	75,00	78,13	9	6
4	Riau	53,45	87,00	71,07	70,42	27	5
5	Jambi	69,71	87,98	75,77	77,77	10	6
6	Sumatera Selatan	73,15	87,29	77,56	79,30	8	6
7	Bengkulu	62,42	85,36	72,39	73,33	20	5
8	Lampung	67,05	88,12	72,65	75,88	17	5
9	Kep. Bangka Belitung	71,62	90,14	76,98	79,53	7	6
10	Kep. Riau	60,41	90,93	80,57	77,23	12	5
11	DKI Jakarta	39,81	93,73	85,10	72,78	22	5
12	Jawa Barat	66,96	90,36	74,70	77,27	11	5
13	Jawa Tengah	61,88	88,13	78,77	76,20	14	5
14	DI Yogyakarta	75,56	87,44	83,15	82,02	3	6
15	Jawa Timur	59,87	87,43	73,20	73,43	19	5
16	Banten	72,38	92,83	74,23	79,75	6	6
17	Bali	68,77	94,19	83,66	82,15	2	6
18	Nusa Tenggara Barat	82,01	88,18	73,21	81,10	4	6
19	Nusa Tenggara Timur	48,72	80,71	59,00	62,72	30	4
20	Kalimantan Barat	65,85	88,02	60,90	71,51	23	5
21	Kalimantan Tengah	68,52	90,75	71,72	76,93	13	5
22	Kalimantan Selatan	85,11	93,94	77,32	85,41	1	6
23	Kalimantan Timur	74,37	89,41	77,29	80,31	5	6
24	Kalimantan Utara	66,43	87,31	74,76	76,11	15	5
25	Sulawesi Utara	64,76	86,19	72,63	74,47	18	5

	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
26	Sulawesi Tengah	59,13	82,35	70,09	70,47	26	5
27	Sulawesi Selatan	68,44	87,52	72,13	75,98	16	5
28	Sulawesi Tenggara	59,57	84,35	70,28	71,34	24	5
29	Gorontalo	63,64	79,59	68,96	70,68	25	5
30	Sulawesi Barat	66,40	83,67	60,65	70,18	28	5
31	Maluku	43,18	72,11	66,52	60,54	32	3
32	Maluku Utara	41,86	81,01	60,11	60,89	31	3
33	Papua	34,55	73,76	66,67	58,25	33	3
34	Papua Barat	43,71	74,65	56,58	58,23	34	3
35	Papua Selatan	49,20	64,11	57,34	56,85	36	3
36	Papua Tengah	31,51	61,12	41,09	44,49	37	1
37	Papua Pegunungan	19,59	62,14	28,13	36,49	38	1
38	Papua Barat Daya	35,36	76,41	62,07	57,86	35	3

Keterangan:

- Jumlah Provinsi adalah 38
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0-100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan rasio penduduk, bobot Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, dan Indeks Pemanfaatan
- Bobot Indeks Ketersediaan = 0,335; Indeks Keterjangkauan = 0,330; dan Indeks Pemanfaatan = 0,335

1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Tabel 17. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2025

PROVINSI		INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	Aceh	62,46	81,51	66,20	70,00	25	5
2	Sumatera Utara	57,24	84,33	73,02	71,47	22	5
3	Sumatera Barat	70,07	86,23	77,00	77,72	7	6
4	Riau	54,90	85,08	71,49	70,42	23	5
5	Jambi	71,08	83,97	73,55	76,16	9	5
6	Sumatera Selatan	77,90	82,39	77,69	79,31	4	6
7	Bengkulu	63,15	80,95	65,73	69,89	26	5
8	Lampung	65,59	82,03	71,69	73,06	15	5
9	Kep. Bangka Belitung	70,64	85,76	78,31	78,20	5	6
10	Kep. Riau	48,81	86,72	80,56	71,96	19	5
11	DKI Jakarta	40,02	88,74	86,05	71,52	20	5
12	Jawa Barat	65,09	83,77	76,12	74,95	10	5
13	Jawa Tengah	59,90	81,44	79,97	73,73	13	5
14	DI Yogyakarta	69,21	80,59	82,57	77,44	8	6
15	Jawa Timur	56,43	82,94	78,80	72,67	16	5
16	Banten	70,63	86,46	76,39	77,78	6	6
17	Bali	69,57	89,81	80,43	79,89	3	6
18	Nusa Tenggara Barat	74,49	80,39	69,30	74,70	11	5
19	Nusa Tenggara Timur	45,47	73,34	56,15	58,24	32	3
20	Kalimantan Barat	67,18	84,15	63,41	71,52	21	5
21	Kalimantan Tengah	64,68	87,15	69,22	73,62	14	5
22	Kalimantan Selatan	84,11	86,21	75,69	81,98	1	6
23	Kalimantan Timur	73,45	86,21	82,87	80,82	2	6
24	Kalimantan Utara	58,87	82,23	76,72	72,56	17	5
25	Sulawesi Utara	62,64	85,22	69,80	72,49	18	5

	PROVINSI	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	IKP PROVINSI	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
26	Sulawesi Tengah	64,75	77,32	69,23	70,40	24	5
27	Sulawesi Selatan	66,95	83,34	72,74	74,30	12	5
28	Sulawesi Tenggara	57,98	78,40	66,45	67,56	28	4
29	Gorontalo	60,96	74,30	74,05	69,75	27	5
30	Sulawesi Barat	60,23	80,83	60,37	67,08	29	4
31	Maluku	39,44	68,87	63,41	57,18	34	3
32	Maluku Utara	33,36	78,78	62,98	58,27	31	3
33	Papua	36,51	72,81	63,27	57,45	33	3
34	Papua Barat	46,99	70,75	58,27	58,61	30	3
35	Papua Selatan	46,06	61,21	54,73	53,96	36	3
36	Papua Tengah	28,54	57,09	39,43	41,61	37	1
37	Papua Pegunungan	27,17	40,27	28,57	31,96	38	1
38	Papua Barat Daya	36,67	74,74	60,32	57,15	35	3

Keterangan:

- Jumlah Provinsi adalah 38
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0-100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan rasio penduduk, bobot Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, dan Indeks Pemanfaatan
- Bobot Indeks Ketersediaan = 0,335; Indeks Keterjangkauan = 0,330; dan Indeks Pemanfaatan = 0,335

1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI AMRAN SULAIMAN



BADAN PANGAN NASIONAL

Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan, 12550

 <http://www.badanpangan.go.id>
 nfa_official@badanpangan.go.id
 (021) 7807377